

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan bisnis.

Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang ditawarkan. Kualitas produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah lembaga perbankan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Syarat sederhana yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Manajemen sebuah bank dituntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan perbankan harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya. Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut adalah meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan dan memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang membeli dan menggunakan produk perusahaan.¹

¹ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 19.

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang memegang posisi penting di dalam pengendalian sistem keuangan suatu Negara. Selain itu Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Bank juga suatu bentuk usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, peranan bank tidaklah terlepas dari kegiatannya dalam pengaturan lalu lintas pembayaran dari waktu ke waktu, bahkan setiap saat dikala bank itu beroperasi. Dari aktivitas bank tersebut tersalurkan berbagai produk bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Ditinjau dari bentuk usahanya bank harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dan di sisi lain bank harus tunduk kepada Bank Indonesia baik secara peraturan maupun pengawasannya. Itulah uniknya dunia perbankan dimana harus mencari keuntungan juga mempunyai fungsi sosial dan sebagai sarana lalulintas moneter dalam memperlancar dan menjaga serta turut serta dalam pembangunan untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu sejahtera adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar tahun 1945. Krisis moneter 1998 merupakan gambaran yang sangat jelas mengenai sektor keuangan dan berdampak sistematis pada dunia perbankan dengan ditutupnya salah satunya Bank Utama yang pada waktu itu menjadi Bank Beku Operasi menjadi Bank Pesona Kriya Dana. Dan belakangan ini muncul juga kasus Century Gate. Hal ini yang membuat penulis semakin bersemangat untuk menulis tesis ini dengan lebih baik dan mendalam karena penulis bekerja di Bank Overseas Express Bank yang kemudian berganti nama menjadi Bank Utama dan terakhir dilikuidasi menjadi Bank Pesona Kriya Dana.

Di dalam perbankan diatur oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana difinisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi ini suatu bank harus turut serta berperan dalam pembangunan Bangsa dan Negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam meningkatkan peranannya di dalam membangun bangsa dan negara perbankan harus menciptakan sebuah sistem perekonomian agar dapat tumbuh dan berkembang dengan pergerakan ekonomi yang sehat untuk itu maka bank selaku lembaga keuangan diatur oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis bank dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :²

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

² Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 149.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dibedakan kegiatan usaha Bank Umum, dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Kegiatan Bank Umum, diantaranya adalah :³

1. Pengiriman uang (*transfer*)
2. Inkaso (*collection*)
3. Pembukaan Letter of Credit (L/C)
4. Jual beli cek perjalanan / turis (*travelers cheque*)
5. Jual beli uang kertas (*banknote*)
6. Kartu kredit (*credit card*)
7. Bank Garansi
8. Aktivitas jual beli surat-surat berharga
9. Kotak pengamanan simpanan (*safe deposit box*)
10. Jual beli atau perdagangan valuta asing
11. Transaksi dalam perdagangan valuta asing
12. Pengawas di Bidang Penerbitan Obligasi
13. Penanggung di Bidang Penerbitan Obligasi
14. Penjaminan Emisi Efek (*underwriting*)
15. Pengesahan (*endosemen*)
16. Mendiskonto

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

³ Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 53.

Bank adalah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utama dan paling pokok adalah mencari dana dan menyalurkan dana tersebut kemasyarakat dengan komposisi yang disebut predikat dan bobot tingkat kesehatan yang diatur SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan usaha kredit yaitu berupa Bunga dan Provisi.

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi : sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Kredit macet selalu terjadi karena berbagai faktor baik yang disengaja atau memang beritikad tidak baik maupun faktor yang tidak disengaja yaitu beritikad baik namun karena keadaan jadi bermasalah atau macet. Dari kualitas aktiva produktif yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu 25% rasionya maka 5 sampai 10 persen merupakan kredit bermasalah dan yang masuk kedalam kategori macet adalah 1 sampai dengan 5 persen yang dimana kalau dirupiahkan nilainya cukup fantastis. Sedangkan yang dianggap perpanjangan kredit hampir 35% merupakan plafond derings artinya pelunasan dilakukan oleh bank itu sendiri kemudian secara administrasi dibuat seakan-akan kredit baru dan inilah

yang kerap merupakan bom waktu dimana sewaktu-waktu bank dapat dikategorikan bangkrut dan salah satu yang membuat Bank Indonesia mengeluarkan keputusan untuk membekukan kegiatan bank tersebut alias menutup atau melikuidasi dan inilah yang terjadi ditempat penulis dahulu bekerja. Akhirnya banyak pihak yang dirugikan termasuk keuangan negara sehingga sedapat mungkin Bank Indonesia berusaha mengambil alih manajemen bank tersebut atau memasukan investor agar masyarakat tidak dirugikan namun jika jumlahnya terlalu besar maka terpaksa menutup bank tersebut.

Penyebab utama dari kerugian bank adalah karena kredit bermasalah. Yang disebut Kredit Bermasalah ialah kredit yang tergolong Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet. Istilah Kredit Bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia perbankan atau istilah lainnya yaitu *Non Performing Loan*. Berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa Kredit Macet adalah bagian dari Kredit Bermasalah. Penyebab utamanya adalah dari faktor sumber daya manusianya yang tidak mematuhi prudential banking dengan benar. Untuk menyalurkan dana ke masyarakat maka Bank melakukan dengan cara memberikan kredit. Dalam memberikan kredit tentu Bank terdapat risiko dan untuk memperkecil risiko Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudencial*) sesuai dengan 6 C, 7 P, dan 3 R yaitu :

a. Prinsip 6 C (*Competency/* kemampuan individual nasabah, *Character/* penilaian terhadap kepribadian, *Capacity/* kemampuan, *Capital/* modal, *Condition/* kondisi ekonomi, *Collateral/* agunan).⁴

1. *Competence* atau kemampuan individual nasabah dalam mengelola usahanya. Hal ini diperlukan berkaitan dengan analisa pemberian kredit. Karena menyangkut kemampuan dalam hal pembayaran kredit.

⁴ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2007), hal 116.

2. *Character* atau kepribadian debitur yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran dan itikad baik calon debitur sehingga tidak menyulitkan penagihan di kemudian hari.
 3. *Capacity* atau kemampuan untuk membayar kredit yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
 4. *Capital* atau modal usaha yang telah ada pada bank sehingga fungsi bank sebenarnya dalam penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan saja.
 5. *Condition* atau prospek usaha nasabah debitur. Bila bank tidak melihat adanya prospek dari usaha ini, maka jadi kredit yang dikucurkan tidak memberikan manfaat apapun sehingga mengancam keberlangsungan kredit yang diberikan.
 6. *Collateral* atau jaminan yang mudah dicairkan.
- b. Prinsip 7 P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*).⁵
1. *Personality* atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, sikap dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
 2. *Party* atau para pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memperhatikan kondisi kesehatan perbankan. Baik berdasarkan berita dari media, surat pembaca, ataupun sengaja mencari informasi tentang kondisi kesehatan bank yang dituju.
 3. *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman kredit. Sebab dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 117.

sampai kredit yang diberikan menimbulkan masalah dikemudian hari.

4. *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.
 5. *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapatan nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
 6. *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan problem laba yang hendak diperoleh.
 7. *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal diluar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh bank.
- c. Prinsip 3 R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*).⁶
1. *Returns* atau hasil yang diperoleh debitur ketika kredit itu dimanfaatkan. Bank harus mempertimbangkan apakah kredit yang diajukan akan membawa manfaat sehingga debitur mampu mengembalikan kredit beserta bunga, ongkos-ongkos dan sebagainya.
 2. *Repayment* atau pembayaran kembali. Bank harus memperhatikan kemampuan membayar kredit debitur sesuai dengan waktu yang

⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal 14.

disediakan.

3. *Risk Bearing Ability* atau kemampuan debitur menanggung risiko bila terjadi hal-hal diluar dugaan kedua belah pihak sehingga menyebabkan kredit menjadi macet.

Bank dalam sektor perekonomian di Indonesia terbagi dalam 2 jenis yaitu :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan mengerti kebutuhan nasabah.

Di Indonesia terdapat dua jenis BPR, yaitu: BPR gaya lama dan BPR gaya baru.⁷

- 1) BPR gaya lama adalah BPR yang ijinnya diperoleh sebelum Pakto 1988, yaitu terdiri antara lain: Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil dan sebagainya. Status dan tugas BPR gaya lama ini ditetapkan dalam undang-undang. Namun sambil menunggu dikeluarkannya undang-undang yang dimaksud, pengaturannya diadakan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Disebutkan bahwa bank-bank desa sebagaimana di atas semuanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

⁷ Djoni S. Gazali, *Op. Cit*, hal 51-53.

Dasar hukum pendirian Bank Perkreditan Rakyat gaya lama ini adalah Staatsblad, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur masing-masing provinsi. BPR gaya lama ini tetap dapat melanjutkan usahanya di tempat semula dengan ketentuan tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diijinkan pindah tempat keluar wilayah Kecamatan tempat kedudukannya, tidak diperkenankan membuka Kantor Cabang dan tidak perlu menyesuaikan modalnya dengan modal minimum BPR gaya baru.

- 2) BPR gaya baru adalah BPR yang ijinnya usahanya setelah Pakto 1988, BPR gaya baru hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha di Kecamatan dan di desa-desa di luar ibukota negara, ibukota provinsi dan ibu kota/kabupaten. BPR gaya baru boleh pula membuka cabang di Kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan. Bentuk Badan Hukum ini bisa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Pemberian Kredit terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988, bank-bank desa dan yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mengingat lembaga-lembaga dimaksud telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat Indonesia, maka keberadaan lembaga yang dimaksud tetap diakui. Karenanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan kejelasan status dari lembaga-lembaga keuangan desa dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Pemerintah telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud

sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BPR Jateng merupakan salah satu BPR yang berada di Jawa Tengah. Pendirian BPR Jateng dilandaskan pada Akta Pendirian No. 10 tanggal 13 Januari 1992, yang dibuat dihadapan Nyonya F. Eka Sumarningsih, SH, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia I No. C2-1688.HT.01.01 th.92, tanggal 21 Februari 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 99, tambahan Nomor 6354/1992 tanggal 11 Desember 1992 dan juga Ijin Menteri Keuangan RI No. Kep.108/KM.17/1992 tanggal 30 November 1992.

BPR Jateng pengelolaannya msih dalam lingkup wilayah Jawa Tengah dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----|
| a. PT. Merdeka Jaya Sentosa | 80% |
| b. Drs. Agus Pramono, MM | 20% |

PT BPR Jateng berlokasi di Kabupaten Grobogan sebagai kantor pusat dan telah mempunyai Kantor Cabang di Semarang pada tahun 2005 yang beralamat di Jalan Kartini No. 11 Semarang, pada tahun 2007 BPR Jateng juga membuka Kantor Kas yang berlokasi di Banyumanik Semarang di jalan Jati Raya Blok D No. 29.

Pada BPR Jateng Cabang Semarang dari total jumlah kredit dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan November 2010 terdapat kredit macet yang rasionya adalah 5.10% dari seluruh total jumlah kredit sebesar Rp. 27.437.732.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Kredit macet pada BPR Jateng dari bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2010 menunjukkan grafik penurunan.

Upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah atau kredit macet adalah dengan cara:

- a. Melakukan Inventarisasi
- b. Penagihan Intensif

- c. Restrukturisasi Kredit
- d. Penghapusan Kredit

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Bidang Legal dalam Komite Kredit untuk Mencegah Kredit Bermasalah di BPR Jateng Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang?
2. Apakah arti penting posisi legal dalam Komite Kredit Perbankan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang?
3. Bagaimana cara menangani penyelesaian kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut untuk mendapatkan suatu hasil yang memang benar-benar riil. Adapun tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis arti penting posisi legal dalam Komite Kredit perbankan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis cara menangani penyelesaian kredit bermasalah di BPR Jateng Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam rangka membantu menemukan pemecahan kebijaksanaan mengenai masalah yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet di perbankan agar jadi antisipasi yang objektif dan ilmu hukum mendapat peranan dalam antisipasi pemberian kredit dimana harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

E. Kerangka Pemikiran

Perbankan tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah koorporasi melainkan harus dipahami sebagai suatu industri, oleh karena bank sebagai suatu industri maka ia terdiri dari rangkaian sistem dan sub-sub sistem yang bersinergis. Menurut Nicholas A Lash, bank sebagai sebuah industri setidaknya memiliki lima tujuan yang perlu untuk diatur, yaitu:⁸

1. Menjaga keamanan bank;
2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat;
3. Memberikan kredit untuk tujuan khusus;
4. Memberikan perlindungan terhadap nasabah;
5. Menciptakan suasana yang kondusif dalam pengambilan kebijakan moneter.

⁸ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 39.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan tidak mudah kolaps dan kepercayaan masyarakat terjaga sehingga hubungan antara masyarakat terjaga sehingga hubungan antara masyarakat dan bank terus berlanjut. Iklim kompetisi yang sehat dimaksudkan untuk etika persaingan yang fair antara sesama bank dalam menarik kepercayaan dari masyarakat tetap terjaga dengan baik. Tujuan memberikan kredit dengan tujuan khusus dimaksudkan untuk memastikan apakah kredit yang diberikan sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan apakah dalam pelunasan kredit berjalan dengan baik. Tujuan memberikan perlindungan kepada nasabah dimaksudkan agar bank dapat bertindak adil, transparan dijamin dengan asuransi atau adanya lembaga penjamin simpanan yang independent. Nasabah adalah asset perbankan dengan tujuan menciptakan suasana kondusif bagi kebijakan moneter dimaksudkan agar pengambilan keputusan dibidang moneter tidak terganggu.⁹

Bank menjadi tiang utama dalam menjalankan sistem keuangan maka instrument hukum sangat diperlukan untuk memperkecil adanya ketidaksamaan dalam hal informasi, yang menurut Anwar Nasution bahwa:¹⁰

“Dalam kerangka kestabilan sistem keuangan, keberadaan instrument hukum diharapkan dapat meminimalisasi asimetri informasi yang terjadi dan paling tidak difokuskan pada tiga aspek pengaturan penting, yakni:

1. Mengatur semua transaksi pemindahan dana dari pihak-pihak/individu-individu dalam lembaga keuangan;
2. Mengatur perilaku (*behavior*) individu-individu/pihak-pihak dalam lembaga keuangan; serta
3. Menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak-pihak dalam lembaga keuangan secara efisien dan cepat.

Dengan pengaturan pada ketiga cakupan aspek hukum tersebut, diarahkan agar kestabilan sistem keuangan dapat tercapai.”

⁹ *Ibid*, hal 39-40.

¹⁰ Anwar Nasution, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, BPHN Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003.

Kestabilan sistem keuangan terkait dua element yaitu stabilitas harga dan stabilitas sektor keuangan, yang mencakup lembaga keuangan serta pasar keuangan yang secara keseluruhan mendukung jalanya sistem keuangan.

Pentingnya gambaran umum hukum perbankan dalam pengaturannya dijabarkan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah ataupun otoritas keuangan. Mengacu pada sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut sebagai berikut:¹¹

- a. Undang-undang Dasar 1945 serta amandemennya (pasal);
- b. Undang-undang, Pokok di bidang perbankan dan bidang ekonomi;
- c. Peraturan Pemerintah, sebagai pelaksana dari undang-undang;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah, (dikhususkan untuk bank milik daerah);
- f. Peraturan lainnya, seperti keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan.

Dalam perjalanannya tidak semua pemberian kredit berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati apabila dengan dengan tumbuhnya usaha-usaha yang sejenis sehingga persaingan semakin ketat. Ada beberapa hal yang menimbulkan permasalahan dalam kredit bermasalah yaitu :¹²

- a) Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit;
- b) Penurunan kondisi keuangan nasabah;
- c) Pengajuan laporan dan informasi lainnya tidak benar;
- d) Menurunnya sikap kooperatif nasabah;
- e) Penurunan nilai jaminan yang disediakan; dan
- f) Timbulnya problem keuangan atau pribadi seseorang.

¹¹ Acuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Materi Pendidikan Jenjang Karir BPR Milik Daerah, oleh PERBAMIDA DIY dan Jateng, Semarang, tanggal 17-18 Maret 2009.

Kebutuhan masyarakat yang beranekaragam sesuai harkatnya selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya itu maka masyarakat membutuhkan permodalan baik itu untuk meningkatkan usahanya maupun meningkatkan daya guna sesuatu barang. Salah satu fasilitas permodalan yang disediakan bank sebagai sebuah lembaga keuangan adalah dengan pemberian kredit.

Pelaksanaan permohonan kredit merupakan cara yang cukup mudah untuk mendapatkan dana segar dengan cepat namun mengandung risiko kemacetan, meskipun dalam penyaluran kredit menggunakan analisis kredit yang paling pandai sekalipun dalam menganalisis setiap permohonan kredit namun risiko kemacetan pasti tetap ada.

Suatu permohonan kredit yang disetujui akan ditindak lanjuti dengan mengadakan perjanjian kredit. Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kreditpun tunduk pada ketentuan umum perjanjian (sebagai bagian dari perikatan) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur tersebut meliputi:¹³

- 1) Hubungan Hukum
Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan 'hak' pada satu pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.
- 2) Kekayaan
Merupakan ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan itu dapat disebut suatu perikatan. Dan ukuran tersebut lazim dapat dinilai dengan uang.
- 3) Pihak-pihak
Setidaknya dalam suatu hubungan hukum harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau pihak yang berpiutang dan pihak yang wajib berutang. Mereka inilah yang disebut subjek perikatan.
- 4) Prestasi (objek hukum)

¹³ Marium Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 1-6.

Sesuatu dengan ketentuan pasal 1234 KUHPdata, prestasi dapat dibedakan atas : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Definisi perjanjian sendiri dapat dilihat ketentuan Pasal 1313 KUHPdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Sementara pengertian kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, menurut hemat penulis perjanjian kredit adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih antara Bank sebagai kreditur dan pemohon kredit sebagai debitur.

Selama terjadinya hubungan hukum antara Bank dan pemohon kredit yang terikat ke dalam perjanjian kredit sangat mungkin terjadi hambatan dalam pelunasan kredit, dan hal ini yang dikenal dengan kredit macet.

Kredit macet terjadi karena debitur mengingkari janji untuk membayar bunga/pokok atau kredit telah jatuh tempo sehingga terjadi kelambatan pembayaran. Kredit macet bila dilihat dari konsep perbankan dan akuntansi cukup berbeda.

Kredit macet menurut konsep perbankan kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit Kurang Lancar, diragukan dan macet; sementara kredit bermasalah bila dilihat dari konsep akuntansi merupakan pemberian kredit yang berisiko tinggi sehingga memaksa bank harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna menghadapi risiko kegagalan pengambilan kredit.

1. Kerangka Konseptual

Konsepsi berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti

sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹⁴

Konsepsi adalah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara teori yang ada dengan kegiatan observasi dalam penelitian, dan juga antar abstrak dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneraliskan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan operasional. Pentingnya suatu definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai, selain dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Kemudian peneliti akan menguraikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yang berkenaan dengan penulisan tesis ini sebagaimana didefinisikan dibawah ini :

- a. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 5).
- b. Nasabah bank adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perbankan, dimana nasabah ada dua pengertian, yaitu nasabah sebagai penyimpan dana dan nasabah sebagai peminjam dana.¹⁵
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atau persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹⁴ Komaruddin dan Yooke, Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hal 122.

¹⁵ Masri Singa Rimbun, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : Lp3ES, 1989), hal 34.

mengwajibkan pihak meminjam untuk mengembalikan atau melunasi hutang setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga (UU No. 10, LN No. 182, Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 31 angka 23).

- d. Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu (UU No. 4, LN No. 42 Tahun 1996, TLN. No. 3632, Pasal 1 angka 2);
- e. Debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;¹⁶
- f. Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan.¹⁷

2. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁹

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada teori kepastian hukum, khususnya kepastian hukum

¹⁶ *Ibid*, angka 3.

¹⁷ Badriyah, *Op.Cit.* hal 116.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI- Press, 1986), hal 127.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung : Mandar Majuh, 1994), hal 17.

dalam pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁰

Bahwa jaminan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur harus dapat dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur.

Selanjutnya secara teoritik kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskan tentang pengertian perjanjian kredit, tetapi diatur tentang pengertian kredit sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dalam hubungannya dengan pemberian kredit, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, di dalam pemberian kredit, Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sehingga kredit yang telah diberikan tersebut mendapat kepastian akan pengembaliannya.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

²⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi* (Jakarta : PT. Agung, 2002), hal 35.

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank selaku kreditur. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank selaku kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit, bersama-sama unsur-unsur lain bank selaku kreditur dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.

Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :²¹

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
4. harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Dengan demikian dalam pemberian kredit perbankan, bank harus menerapkan "Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer*),²² termasuk pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam menerapkan prinsip tersebut, bank wajib untuk :

- a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

Dalam pemberian kredit yang telah dikucurkan tersebut

²¹ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hal 16.

²² Badriyah, *Op.Cit.* hal11.

mengandung risiko macet atau debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka selain faktor di atas bank juga harus melihat unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan, dimana jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya. Eksistensi adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan tidak mungkin ada tanpa perjanjian kredit. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian penjaminan akan berakhir pula.

Jenis-jenis Jaminan Kredit:²³

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan dalam Pasal 1820 KUH Perdata disebut sebagai penanggungan utang, Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang tersebut tidak memenuhinya. Pelaksanaan perjanjian perorangan selalu dibuat oleh pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban membayar kredit tersebut, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh debitur.

2. Jaminan Kebendaan

Mengingat pasal 8 UU Perbankan, yang berbunyi :

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

²³ *Ibid*, hal 70-73.

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjkan.

- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Keyakinan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan berupa jaminan tambahan yang disebut sebagai agunan.

Jadi sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan.

Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23, yang berbunyi:

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah."

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, di mana sebagian besar dana yang diperlukan tersebut di peroleh melalui fasilitas kredit yang mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan dan

kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemberi kredit.

Pengaturan umum tentang jaminan ini ada didalam ketentuan KUHPerdata, di mana ditentukan bahwa :

“Segala kebendaaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Jadi hak-hak tagihan seorang kreditur di jamin dengan :²⁴

- a. Semua barang-barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat, semua barang yang akan ada, disini berarti barang-barang yang pada waktu pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi di kemudian hari menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal di kemudian hari benar-benar menjadi milik debitur.
- b. Baik barang bergerak maupun tak bergerak Ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali .

Dari Pasal 1131 KUHP Perdata, dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut :

- a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
- b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
- c. Hak tagihan kreditur hanya di jamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “*person debtor*”.

Selanjutnya dalam pengikatan jaminan kredit, harus

²⁴ J. Satria, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 4.

diperhatikan pembedaan jenis jaminan yaitu :²⁵

a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.

b. Jaminan tambahan dapat berupa :

1). Jaminan pribadi (dapat diikat dengan akta penanggungan /*borgtocht*) yang disebut "*personal guaranty*" atau jaminan perusahaan (*company guaranty*).

2) Jaminan kebendaan yang berupa: barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak. Benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tak bertubuh.

Benda bertubuh seperti: kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang perhiasan, dan sebagainya.

Benda tak bertubuh seperti: wesel, deposito berjangka, piutang dagang, surat saham, dan sebagainya.

Pembedaan jenis benda ini memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda, yakni :

1. Benda bergerak pengikatan berupa fidusia atau gadai;
2. Benda tak bergerak, pengikatan berupa hak tanggungan.

Sedangkan Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank selaku kreditur mempunyai kegunaan sebagai berikut :²⁶

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau

²⁵ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Kedua (Jakarta : PT. Gramedia, 1991), hal 77.

²⁶ *Ibid*, hal 84.

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat yang dapat memberikan pedoman dan arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti sehingga penelitian berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan²⁷. Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam pendahuluan.

Metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya²⁸. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seorang peneliti harus memperhatikan metode yang digunakan.

²⁷ Komarudin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1979), hal 27-79.

²⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 9.

Soerjono Soekanto mengemukakan peranan metodologi dalam suatu penelitian adalah:²⁹

1. Menambah kemampuan pada ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan penelitian inter disipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan tentang masyarakat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan normatif adalah dalam penelitian ini menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian yuridis normatif adalah suatu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif³⁰, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembentukan perjanjian kredit, menyangkut analisis permohonan kredit dan persetujuan kredit, serta penyelesaian kasus kredit macet.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 7.

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Op. Cit.* hal 9.

makna, khususnya terhadap indikator umum yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini kelak menggunakan data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap subyek penelitian yaitu wakil dari BPR Jateng Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung dari sumber yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Sekunder Umum

Data sekunder yaitu data yang bersifat publik meliputi data arsip, data resmi pada BPR Jateng Semarang dan juga data yang dipublikasikan.

2. Data Sekunder bidang hukum meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pedata;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 4) SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, lokakarya, doktrin dan tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Perikatan.
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Perbankan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan juga pendapat ahli-ahli hukum yang dimuat di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian ilmiah memerlukan data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diambil dari sumber yang tepat. Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan hasil penarikan kesimpulan yang kurang benar, kurang relavan sehingga dapat menimbulkan hal yang tidak sesuai dalam penyusunan tulisan hukum.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan juga melalui wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengunjungi BPR Jateng Semarang dan melakukan wawancara langsung kepada pihak BPR Jateng Semarang yang telah ditunjuk mewakili perusahaan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³¹

Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hal 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah :

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana

dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ini merupakan kegiatan utama perbankan.

2. Asas-asas Hukum Perbankan

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan yang menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian".

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni:

“bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara Kreditur dan debitur bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan”.³²

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lainlain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

3. Fungsi Bank

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perbankan, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

³² Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan Undang- Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 10.

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.³³

4. Tujuan Bank

Dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan diatur tentang tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

5. Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahnya

a. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang Perbankan dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang Perbankan diartikan sebagai Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut fungsinya, bank dibagi 3 jenis yaitu:

³³ Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hal. 62.

- a) Bank Sentral
Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b) Bank Umum
Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- c) Bank Perkreditan Rakyat
Yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.³⁴

b. Kegiatan usaha Bank

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum adalah :

- 1. Undang- undang Perbankan.
- 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 13 Mei 1999.
- 3. Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-undang Perbankan.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Perbankan, disebutkan usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, Menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

³⁴ Dendawijaya, *Op. Cit*, hal 26.

- e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, bank umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus

menarik kembali penanyaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- a) Undang-undang Perbankan.
- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
- c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
- d) Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-undang Perbankan.

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

6. Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumers principle*).

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*).

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 1998.

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*).

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan

pajak, penyelesaian hutang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*).

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

7. Tugas-tugas Dari Lembaga Bank

Tugas-tugas Bank, antara lain :

a. Memberikan Kredit.

Kredit yang diberikan baik kepada perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan modal atau uang, pemberian kredit ini dibiarkan untuk kegiatan produksi dan untuk keperluan lainnya. Pemberian kredit ini dapat berbentuk:

- 1) Kredit jangka panjang.
- 2) Kredit jangka pendek.
- 3) Kredit jangka menengah.

Di samping bantuan Bank yang bersifat pinjaman kepada pengusaha, Bank juga berpartisipasi dalam pemodalan perusahaan yang membutuhkan modal.

- b. Menarik dana atau uang dari masyarakat.

Masyarakat dapat menyimpan uangnya yang belum atau tidak dipergunakan, dalam bentuk deposito berjangka, tabanas dan bentuk tabungan lainnya.

- c. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang jasa ini dapat berbentuk antara lain pengeuaran cek, pengiriman uang dari satu kota ke kota berbentuk kota lainnya antar negara dan selain itu sebagai media tukar menukar valuta asing.
- d. Kegiatan lainnya, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk keperluan lainnya.

Jika ditinjau secara garis besar maka tugas Bank seperti tersebut di atas merupakan aktivitas yang erat hubungannya dengan dunia perdagangan dan dunia keuangan.

B. Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Ditinjau dari seorang yang memperoleh kredit (debitur), kredit yang istilahnya diambil dari bahasa Yunani "*credere*" berarti percaya atau kepercayaan. Ditinjau dari aspek ekonomis, kredit dapat diartikan sebagai penundaan barang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, melainkan pengembalian tersebut dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³⁵

Rumusan pengertian kredit juga diberikan oleh Muchdarsyah Sinungan yaitu : "suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan

³⁵ Edy Putra Tje 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal 1.

dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga".³⁶

Di dalam perpustakaan hukum Perdata terdapat beberapa pendirian mengenai arti kredit, antara lain :

a. Savelberg dalam bukunya Mariam Darus, menyatakan "kredit" mempunyai arti, antara lain :

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*), dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- 2) Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.³⁷

b. Mr. J.A. Levy dalam bukunya Badruzaman, merumuskan arti hukum dari kredit :

"Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari".³⁸

Di dalam istilah itu terkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab ialah bahwa penerima kredit "dianggap mampu" untuk mengembalikan pinjaman di belakang hari, dan akibatnya ialah si penerima kredit itu "dipercaya".

Berdasarkan pengertian kredit di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian kredit didasarkan pada unsur kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur). Unsur kepercayaan tersebut timbul dari adanya batasan waktu pengembalian kredit pada suatu masa/waktu tertentu yang akan

³⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 1984), hal 12.

³⁷ Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal 24.

³⁸ *Ibid*, hal 29.

datang, sehingga memungkinkan timbulnya risiko bagi kredit dalam bentuk tidak dikembalikannya dana kredit yang telah dilepaskannya. Oleh karenanya dalam pengembaliannya debitur berkewajiban untuk membayar kontra prestasi yang berupa imbalan atau bunga kredit.

Di dalam perbankan pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

"Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit tersebut di atas mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 adalah :

"Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja.

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada

lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kredit Bank (PPKPB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Pengertian kredit dalam PPKPB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endorsemen dan awal surat-surat berharga. Sedangkan bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Dari pengertian kredit yang begitu luas maka bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas dan solvabilitas oleh bank dalam kegiatan perkreditan, karena segi likuiditas tersebut merupakan hal yang penting dari bank dalam hal menyangkut kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan pentingnya solvabilitas dalam hal bank tersebut diharapkan mempunyai

kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Di mana solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya, sehingga untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitur) itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (*bankable*). Cara menyelidikinya dengan demikian melalui analisis kredit yang ditujukan kepada si calon debitur dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan tertentu dan acuan yang telah baku pada dunia perbankan.³⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara umum unsur-unsur yang terkandung dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan.

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang telah ditetapkan.

b. Waktu.

Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembalian dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu.

c. *Degree of Risk*.

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko. Risiko ini timbul karena prestasi telah diberikan kepada penerima kredit.

d. Prestasi.

Dalam perkembangan perkreditan di masa modern ini, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.⁴⁰

³⁹ Mohamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 381-382.

⁴⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), hal 9.

2. Proses Pemberian Kredit

Seseorang atau badan hukum yang telah mengajukan permohonan kredit masih harus melalui prosedur tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan lagi yang harus dilalui oleh nasabah debitur tersebut, antara lain :⁴¹

1. Persetujuan pemberian kredit

Berbentuk surat pemberitahuan persetujuan kredit yang memberitahukan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada calon nasabah debitur. Dalam persetujuan pemberitahuan juga terdapat persyaratan umum mengenai kredit, antara lain:

- a. Besarnya kredit yang disetujui;
- b. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
- c. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
- d. Cara-cara pembayarannya;
- e. Barang-barang jaminan yang diminta;
- f. Syarat-syarat lainnya;
- g. Persetujuan dan tanda tangan calon debitur.

2. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debiturnya. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta di bawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur, sebab dengan dasar perjanjian kredit, bank dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah. Oleh sebab itu, kiranya perjanjian kredit amat penting untuk dipelajari (setiap klausul yang terdapat di dalamnya).

⁴¹ Badriah Harun, *Op. Cit*, hal 18-19

3. Jaminan dan agunan kredit

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur (bank) karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya. Jaminan yang paling utama menurut undang-undang adalah sebuah kepercayaan bahwa kredit yang diberikan akan dibayar. Sehingga dimungkinkan sebuah kredit tanpa agunan barang karena kepercayaan tersebut. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

4. Pengikatan jaminan kredit

Keberadaan perjanjian pengikatan jaminan kredit adalah bersifat tambahan (*accessoir*). Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Sehingga sebelum perjanjian pengikatan jaminan kredit dibuat, maka perjanjian kredit harus terlebih dahulu ada. Akibat hukumnya adalah apabila perjanjian kredit hapus, maka perjanjian pengikatan jaminan berakhir karena sebab barang yang dijanjikan musnah, maka perjanjian kredit tidak ikut berakhir.

5. Pencairan kredit

Pencairan kredit dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah dibuat. Kapan kredit itu dicairkan tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

6. Pembayaran kewajiban

Pembayaran kewajiban dalam hal ini adalah pembayaran cicilan kredit yang dilakukan oleh debitur kepada bank sehingga lunas.

7. Perubahan kredit

Dalam kondisi tertentu kredit dapat diubah. Hal-hal yang dapat diubah misalnya persyaratan, jumlah, jangka waktu, dan bunga.

8. Pelunasan kredit disertai dengan penarikan jaminan kredit

Setelah debitur melunasi kreditnya pada bank, maka segala jaminan yang bersifat kebendaan dapat diambil kembali oleh debitur atau pihak lain yang menjamin barangnya. Sehingga barang (benda jaminan) tersebut kembali kepada keadaan semula seperti sebelum perjanjian kredit diadakan.

3. Prinsip-prinsip Kredit

Untuk melakukan kredit yang sehat dikenal adanya prinsip 5C, tetapi ada juga sarjana yang menambahkannya menjadi 6C dengan memasukkan *Constraint* (hambatan) sebagai salah satu prinsip dalam pemberian kredit. Prinsip ini diterapkan oleh Bank/Kreditur untuk menganalisa calon Nasabah/Debitur sebelum memberikan kredit, prinsip tersebut meliputi:

a. *Character* (Watak)

Pemberian kredit telah diuraikan sebelumnya adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank/Kreditur bahwa si Peminjam mempunyai moral, watak atau sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan mempunyai tanggung jawab. Dalam pemberian kredit, Bank/Kreditur juga akan menilai apakah Nasabah/Debitur mempunyai itikad baik.

Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan menjadi tanggung jawab calon debitur. Faktor karakter ini sangat penting sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi jika ia tidak memiliki itikad baik akan membuat kesulitan bagi Bank/Kreditur di kemudian hari.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon Nasabah/Debitur dalam mengembangkan usahanya selama ini, serta

kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini untuk mengetahui kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal usaha dari calon Nasabah/Debitur yang telah ada sebelum mendapatkan kredit. Untuk menentukan berapa besar fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank/Kreditur sebagai tambahan modal, dapat dilihat melalui laporan keuangan dan dari mana saja modal yang ada atau didapat debitur pada saat sekarang.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon Nasabah/Debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dengan adanya jaminan, Bank/Kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan telah diteliti keabsahannya.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economic adalah kondisi yang perlu diperhatikan meliputi kondisi ekonomi sektor usaha calon Masabah/Debitur dan kondisi ekonomi politik secara umum dimana perusahaan calon Nasabah/Debitur berada. Selain itu juga prospek usaha yang dijalankan hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

f. *Constraint* (Hambatan-hambatan)

Constraint adalah batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan

usaha di suatu tempat, walau semua prinsip memungkinkan atau cukup baik.

4. Fungsi dan Tujuan Kredit

a. Fungsi Kredit

Bank memegang peranan yang sangat penting selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran. Sebagai lembaga pemberi kredit, maka pengertian tentang Bank dan kredit tidak dapat dipisahkan, karena :

- 1) Kegiatan utama, dari Bank adalah perkreditan.
- 2) Keberhasilan sesuatu Bank tergantung sebagian besar dari usaha perkreditannya, dimana lebih kurang 75% penghasilan Bank adalah dari kegiatan-kegiatan kredit.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

Fungsi kredit secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal uang. Dana dari masyarakat yang disimpan di Bank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan dalam bentuk prosentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh Bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dana yang mengendap di Bank (diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.
- 2) Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

Dengan bantuan kredit yang diperoleh dari Bank produsen dapat memproduksi bahan mentah, menjadi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Selain itu

produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan lewat rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro, bilyet dan sebagainya.

4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Bantuan kredit yang diterima dari Bank tersebut digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Hal ini berarti menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk berusaha meningkatkan produktivitas dan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena ini dapat diatasi oleh Bank dan kreditnya.

5) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada masyarakat pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha, antara lain :

- a) Pengendalian inflasi;
- b) Peningkatan ekspor;
- c) Rehabilitasi prasarana;
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka kredit Bank memegang peranan penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan ke sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Kredit Bank dijalankan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Dengan pendapatan yang terus meningkat

berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Dengan peningkatan pendapatan ini, maka pendapatan Negara lewat pajak akan bertambah, penghasilan devisa juga bertambah, sehingga secara langsung atau tidak langsung, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai alat lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan yaitu bunga relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar Negara dengan istilah kredit G to G (*government to government*), maka hubungan antar Negara pemberi kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

b. Tujuan Kredit

Karena tujuan merupakan sasaran yang harus dicapai dalam melakukan setiap usaha. Bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya untuk tujuan sebagai berikut :

1) *Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.

2) *Safety*

Yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan

yang berarti.⁴²

Dalam rangka mencapai kedua tujuan di atas, maka seluk beluk kegiatan Bank untuk menjamin profitabilitas serta penjagaan posisi likuiditas perlu dilakukan seksama.

Di dalam perjanjian kredit, penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit. Penggunaan kredit terikat pada program pemerintah di dalam pembangunan. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat, dalam usahanya, tersebut berpedoman pada program-program yang telah digariskan oleh pemerintah.

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa pemberian kredit oleh Bank bukan semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi juga membantu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan.

5. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan kepada:⁴³

a. Menurut kelembagaannya;

Kredit perbankan dengan melihat kelembagaannya maka dikenal beberapa jenis kredit. Pengelompokan demikian dengan dasar kriteria dari segi kelembagaannya, yaitu dalam arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan

⁴² *Ibid*, hal 4.

⁴³ Mohamad Djumhana, *Op. Cit*, hal 373-382.

pelaksana kredit itu sendiri. Adapun jenis kredit dengan dasar pengelompokan menurut kriteria kelembagaan ini, terdiri dari:

- 1) Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- 2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- 3) Kredit langsung kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.
- 4) Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

b. Menurut jangka waktu;

Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:

- 1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel. Juga dapat berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.
- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit

berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Menurut penggunaan kredit;

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi.

Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru.

- 3) Perpaduan antara kredit konsumtif, dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

d. Menurut kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkannya;

Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga sering disebut *documentary credit*. Kredit seperti ini banyak di-

gunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat, dan apabila transaksinya berlainan negara maka sangat terkait sekali dengan valuta asing. Jenis kredit ini di antaranya terdiri:

- 1) Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

- 2) Kredit impor.

Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

- e. Menurut aktivitas perputaran usaha;

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri:

- 1) Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Adapun badan usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kriteria:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - b) Memiliki khas penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah;
 - c) Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung usaha menengah atau usaha besar;

e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2) Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

3) Kredit Besar.

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

f. Menurut jaminannya;

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:

1) Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (*unsecured loan*).

Adapun yang dimaksudkan dengan kredit tanpa jaminan ini yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya.

2) Kredit dengan jaminan (*secured loan*).

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya: berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

6. Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Pasal 1c Undang-undang Perbankan jo. Pedoman kebijaksanaan dibidang perkreditan, Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/66

tanggal 3 Oktober 1966 Nomor 1 angka 5. Instruksi Presidium Kabinet ini mengatakan bahwa “Dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank dan nasabah atau antara Bank Sentral dan bank-bank lainnya”.

Bank/Kreditur melepaskan kredit kepada Nasabah/Debitur dimulai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Jika permohonan tersebut dianggap layak maka dibuat suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Kata sepakat antara Pemberi Kredit dengan Penerima Kredit merupakan unsur yang mutlak sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Namun dasar yang lebih penting diadakan perjanjian kredit yaitu sebagai alat bukti.⁴⁴ Selain itu menurut CH. Gatot dalam bukunya Djumhana, menyebutkan bahwa salah satu fungsi perjanjian kredit ini, yaitu sebagai alat bukti mengenai batas hak-hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.⁴⁵

Mariam Darus menyatakan bahwa dari Pasal 1c dan 2 Undang-undang Perbankan mengandung norma bahwa perjanjian kredit berdasarkan pada perjanjian pinjam uang (Pasal 1c), terhadap Bank/Kreditur, yang dimaksud di dalam UUPerbankan ini, berlaku segala macam hukum Indonesia (Pasal 2), artinya termasuk juga Hukum Perdata.⁴⁶

Pinjam uang menurut KUHPerdata bisa terjadi tanpa jaminan. Menurut Staat Blad 1938 Nomor 523, melepaskan uang hanya ditujukan untuk Perorangan dan Badan Hukum yang usahanya meminjamkan uang (Pasal 2). Undang-undang ini bermaksud memberikan pengertian bahwa perjanjian meminjamkan uang meliputi perjanjian dengan nama dan bentuk

⁴⁴ Rahman, Hasanudin, *Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal 150.

⁴⁵ Djumhana, *Op. Cit*, hal 228.

⁴⁶ Mariam Darus, *Op. Cit*, hal 7.

apapun juga dengan tujuannya untuk menyerahkan uang secara langsung atau tidak langsung kepada Peminjam dengan kewajiban Peminjam untuk melunasi hutangnya sesudah jangka waktu tertentu sekaligus ataupun mengangsur, yaitu dengan membayar sejumlah uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan sesuatu benda ataupun beberapa benda.

Perjanjian pinjam uang disini mempunyai arti yang luas, karena perjanjian ini meliputi semua perjanjian yang dari nama dan bentuknya tidak merupakan perjanjian pinjam uang, akan tetapi tujuannya meminjamkan uang. Ada juga beberapa sarjana yang berpendapat lain.

Menurut Marhainis Abdul Hay dalam bukunya Mariam Darus mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tentang pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit.⁴⁷

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata di Indonesia adalah salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai pada Pasal 1759 KUHPerdara, Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa :

“Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tje' Aman ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil.⁴⁸ Sedangkan menurut Mariam Darus perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan

⁴⁷ *Ibid*, hal 28.

⁴⁸ Tje' Aman, *Op. Cit*, hal 31.

uang.⁴⁹ Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara Pemberi dan Penerima Pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit Bank baru terjadi setelah adanya prestasi yang berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak Bank/Kreditur kepada pihak debitur.

Jika dilihat dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik adanya persamaan dan perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam uang.

Persamaan antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang yaitu bahwa keduanya sama-sama mempunyai tujuan untuk meminjamkan uang.

Perbedaannya yaitu bahwa perjanjian kredit subyeknya yaitu Nasabah/Debitur dan Bank/Kreditur, sedangkan pada perjanjian pinjam uang subyeknya perorangan atau badan hukum yang usahanya meminjamkan uang. Selain itu pada perjanjian pinjam uang bisa saja nama dan bentuknya tidak merupakan pinjam uang. Tetapi pada perjanjian kredit bentuk atau obyeknya itu pasti berupa uang.

7. Jaminan pada Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit sesuai dengan prinsip 5C atau 6C jaminan merupakan unsur yang penting dalam menganalisa apakah calon debitur bisa mendapat kredit dari Bank/Kreditur atau tidak. Fungsi jaminan ini sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam KUHPerdara, jaminan diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 menyebutkan :

⁴⁹ Mariam Darus, *Op. Cit*, hal 27.

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dari uraian Pasal 1131 KUHPerdara tersebut berarti bahwa semua harta kekayaan si berhutang dijadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Harta si berhutang meliputi:

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak.
- b. Yang sudah ada saat perjanjian dibuat.
- c. Yang baru ada saat perjanjian dibuat.

Pasal 1132 KUHPerdara berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya : Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum, dalam arti biaya yang menjadi jaminan adalah semua harta debitur.

Menurut Hartono Hadisoeparto yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jadi tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.⁵⁰ Oleh karena lembaga jaminan itu mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka diperlukan jaminan yang baik.

Menurut Subekti jaminan yang baik yaitu :

⁵⁰ Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal 50.

- a. Jaminan yang secara mudah dapat membantu perolehan kredit itu bagi pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
- c. Dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti setiap barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima atau pengambil kredit.⁵¹

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pokok. Jadi adanya dan hapusnya perjanjian ini tergantung pada perjanjian pokoknya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan ini digolongkan :⁵²

- a. Jaminan yang lahir dari Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
 - b. Jaminan umum dan jaminan khusus.
 - c. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari Undang-undang tanpa adanya perjanjian antara para pihak.
 - d. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan terhadap benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus (Pasal 1133 KUHPerduta) yang hanya berlaku terhadap kreditur tertentu saja.
 - e. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan.
- Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang dapat berupa hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan dari siapapun juga selalu mengikuti bendanya, contohnya: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan lain-lain.

⁵¹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 29.

⁵² Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal 76.

Jaminan yang bersifat perseorangan adalah jaminan yang hubungan langsung pada orang tertentu.

f. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan yang obyeknya berupa benda bergerak baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menurut KUHPerdara, penggolongan atas benda bergerak dibedakan menjadi 2 (dua) :

- 1) Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan misalnya: mobil, motor, dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak misalnya: hak memungut hasil atas benda bergerak. Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 KUHPerdara. Jaminan atas benda yang tidak bergerak adalah jaminan yang obyeknya merupakan benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah.

g. Jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.

Jaminan dengan menguasai benda adalah jaminan dengan penyerahan secara nyata terhadap benda yang dijadikan jaminan. Jadi benda jaminan berada dalam pihak kreditur yang akan dikembalikan kepada debitur setelah piutangnya dibayar. Jaminan tanpa menguasai bendanya,⁵³ penyerahannya tidak secara nyata terhadap benda yang dijadikan jaminan misalnya: fidusia.

8. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata *overseenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).

⁵³ *Ibid*, hal 43.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah kewajiban, hal tersebut jelas dalam kata-kata Subekti bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵⁴

Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
- b. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

9. Asas-asas dalam Perjanjian

Secara umum, asas perjanjian ada 5 yaitu :⁵⁵

- a. Asas kebebasan berkontrak.

Bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). Pasal-pasal⁵⁶ dalam hukum perjanjian sebagian besar dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1981), hal 1.

⁵⁵ Salim, HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 9.

⁵⁶ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 13-14.

perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri, maka para pihak dianggap tunduk pada Undang-undang dalam hal ini Buku III KUH Perdata. Jadi dapatlah dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

b. Asas konsensualisme.

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata), maksudnya untuk mewujudkan kemauan para pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*).

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

d. Asas itikad baik (*Togoe dentrow*).

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), itikad baik ada 2 yaitu :

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas kepribadian (*personalitas*).

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya

terdapat di dalam Pasal 1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ke tiga.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada 10 asas perjanjian, yaitu:⁵⁷

- 1) Kebebasan mengadakan perjanjian.
- 2) Konsesualisme.
- 3) Kepercayaan.
- 4) Kekuatan mengikat.
- 5) Persamaan hukum.
- 6) Keseimbangan.
- 7) Kepastian hukum.
- 8) Moral.
- 9) Kepatutan.
- 10) Kebiasaan.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialitas*) dan bagian bukan inti (*Naturalia* dan *Accidentalia*):⁵⁸

a. Unsur *Essensialia*.

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan untuk mengetahui ada/tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contohnya : Kesepakatan.

b. Unsur *Naturalia*.

Unsur yang lazim ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya : menjamin tidak ada cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalia*.

Unsur yang harus tegas diperjanjikan. Misalnya : pemilihan tempat kedudukan.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, Bandung: Alumni, 2006), hal 108-120.

⁵⁸ *Ibid*, hal 99.

10. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

a. Sepakat (*Toestemming*)

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.⁵⁹

Unsur kesepakatan :

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal yang penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

Teori-teori mengenai terjadinya kesepakatan antara lain :⁶⁰

1) Teori Pernyataan.

Bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kelemahan teori ini sangat teoritis sehingga kesepakatan dianggap otomatis terjadi.

2) Teori Pengiriman.

Bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahan teori ini adalah bagaimana mengetahui tentang hal tersebut? bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

3) Teori Pengetahuan.

Bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun

⁵⁹ *Ibid*, hal 98.

⁶⁰ Salim, HS. *Op. Cit*, hal 30-31.

penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahan teori ini bagaimana kita mengetahui isi penerimaan itu apabila belum menerimanya.

4) Teori Penerimaan.

Bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan bersedia menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Pernyataan kehendak ada dua macam :

1) Secara tegas.

a) Secara tertulis.

(1) Dengan akta dibawah tangan.

(2) Dengan akta otentik.

b) Secara lisan.

c) Dengan tanda.

2) Secara diam-diam.

Apabila terjadi pernyataan yang keluar tidak sama dengan kemauan yang sebenarnya, ada beberapa teori :⁶¹

1) Teori Kehendak.

2) Bahwa terjadinya perjanjian karena adanya kehendak para pihak.

3) Teori Pernyataan.

Bahwa terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Walaupun terjadi perbedaan kehendak, perjanjian tetap terjadi.

4) Teori Kepercayaan.

Bahwa terjadinya perjanjian adalah pernyataan seseorang yang secara objektif dapat dipercaya.

Kelemahannya terletak pada kepercayaan yang sulit untuk dinilai.

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal 93-94.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Selain itu dikenal dengan cacat kehendak, maksudnya kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan.

Ada tiga unsur cacat kehendak menurut Pasal 1321 KUH Perdata :

- 1) Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan/*dwaling* (Pasal 1322 KUH Perdata).

Dianggap sesat apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru mengenai orangnya (*error in persona*) atau objeknya (*error ini substantia*). Cirinya : tidak ada pengaruh dari pihak lain.

- 2) Paksaan/*dwang* (Pasal 1323-1327 KUH Perdata).

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.⁶²

- 3) Penipuan/*bedrag* (Pasal 1328 KUH Perdata).

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal 101.

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orang atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakati.

Apabila terjadi ketiga hal tersebut di atas maka perjanjian dapat dibatalkan.

Selain⁶³ itu perjanjian dapat dibatalkan kalau juga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan/*Undue Influence* (akan tetapi hal ini tidak dikenal dalam KUH Perdata). Pada hakikatnya ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu pada ke dua hal berikut ini, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomi.
- 2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan termasuk tentang psikologi, pengetahuan dan pengalaman.

Di dalam penyalahgunaan keadaan, tidak terjadi ancaman fisiknya saja kadang-kadang salah satu pihak punya rasa ketergantungan, suatu hal darurat, tidak berpengalaman, atau tidak tahu. Karena KUH Perdata tidak mengatur, maka dasar hukum yang dipakai adalah yurisprudensi. Konsekuensinya bila ada penyalahgunaan keadaan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

b. Kecakapan

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Yang dimaksud cakap untuk berbuat adalah :⁶⁴

- 1) Orang Dewasa (masing-masing peraturan berbeda-beda). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Apabila belum berusia 21 tahun, maka apabila akan melakukan

⁶³ Salim, HS. *Op. Cit*, hal 28.

⁶⁴ *Ibid*, hal 50.

perbuatan hukum harus diwakili oleh wali/perwalian (Pasal 331-414 KUH Perdata).

2) Sehat akal pikiran (tidak ditaruh dibawah pengampuan).

Diatur dalam Pasal 433-462 KUH Perdata tentang pengampuan.

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam segala hal. Di dalam melakukan perbuatan hukum, orang tersebut (*curandus*), oleh putusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan harus diberi seorangng wakil menurut Undang-undang yang disebut pengampu (*curator/curatrice*).

Dianggap tidak cakap menurut Pasal 433 KUH Perdata apabila:⁶⁵

- 1) Keadaan dungu.
- 2) Sakit ingatan/gila/mata gelap (dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya).
- 3) Pemboros atau pemabuk (ketidakcakapan bertindak terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja).

Pengampuan didasarkan karena adanya permohonan dan adanya putusan hakim. Yang dapat mengajukan permohonan adalah keluarga, diri sendiri, dan jaksa dari kejaksaan. (Pasal 434-435 KUH Perdata).

Apabila orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka dapat dimintakan pembatalan (Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata).

Ada 3 macam pembatalan, yaitu :⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal 54-55.

- 1) Batal demi hukum.
 - a) Kembali ke keadaan semula artinya akibat dari perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada.
 - b) Tanpa diperlukan lagi keputusan hakim untuk pembatalan.
- 2) Batal.
 - a) Perbuatan dan akibatnya itu dianggap tidak pernah ada.
 - b) Pembatalan yang memerlukan putusan hakim ada 2 yaitu :
 - (1) Batal absolut artinya setiap orang berhak mengajukan permohonan pembatalan.
 - (2) Batal relatif artinya yang berhak mengajukan permohonan pembatalan adalah orang-orang tertentu.
- 3) Dapat dibatalkan.
 - a) Perbuatan dan akibat dianggap ada sampai saat adanya pembatalan.
 - b) Memerlukan keputusan hakim untuk pembatalan.

c. Suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal tertentu adalah tentang objek perjanjian.

Menurut Pasal 1332-1334 KUH Perdata, objek perjanjian adalah :⁶⁷

- 1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), harus dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

⁶⁶ Juni Rahardjo, *Hukum Administrasi Indonesia Pegetahuan Dasar*, (Yogyakarta: Atmajaya, 1995), hal 79.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal 104-105.

- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingann umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdata), dan halal yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditentukan juga syarat atau formalitas tertentu dengan peraturan perundang-undangan. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan disebut syarat subjektif karena mengenai subjeknya.

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Batas waktu untuk membatalkannya adalah 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata). Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena mengenai objeknya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, maksudnya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan. Terhadap perjanjian formal bila tidak dipenuhi formalitasnya yang telah ditetapkan Undang-undang maka perjanjian itu juga batal demi hukum.⁶⁸

11. Akibat dari suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata adalah:

- a. Perjanjian mengikat para pihak

Yang dimaksud para pihak yaitu :⁶⁹

⁶⁸ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 20 dan 25.

⁶⁹ *Ibid*, hal 32.

- 1) Para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata)
 - 2) Ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci (*enblock*).
 - 3) Pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Maksudnya melaksanakan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain dari yang membuat perjanjian.
- Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian, bila bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, kepatutan, kebiasaan dan sesuai Undang-undang.

12. Macam-macam Perjanjian

- a. Perjanjian menurut sumbernya :⁷⁰
- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga
Misalnya : Perkawinan
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 - 3) Perjanjian *Obligatoir*, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1986), hal 11.

- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
- b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:⁷¹
- 1) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada dua macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna.
 - 2) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lain hanya ada hak.
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi :⁷²
- 1) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak.
 - 2) Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/bernama/*nominaat* dan perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat* perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUH Perdata).⁷³
- 1) Perjanjian khusus/bernama/*nominaat*, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUH Perdata.⁷⁴
Perjanjian ini terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUH Perdata antara lain : perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk

⁷¹ Salim, HS, *Op. Cit*, hal 19-20.

⁷² *Ibid*, hal 20.

⁷³ *Ibid*, hal 18.

⁷⁴ Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, hal 88.

melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan dan perjanjian perdamaian.

- 2) Perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat*/perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.⁷⁵

Unsur-unsur perjanjian *innominaat*, yaitu :

- a) Perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata.
- b) Perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- c) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian *innominaat* didasarkan pada kebebasan berkontrak sehingga sistem pengaturan hukum perjanjiannya adalah sistem terbuka/*open system*.

Dilihat dari aspek pengaturannya, perjanjian *innominaat* dibedakan menjadi 3, yaitu :

- a) Perjanjian *innominaat* yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri.
- b) Perjanjian *innominaat* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c) Perjanjian *innominaat* yang belum diatur atau belum ada Undang-undangnya di Indonesia.

⁷⁵ Salim, HS, *Op. Cit*, hal 4 dan 17.

Perjanjian *innominaat* bersifat khusus karena tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perjanjian *Nominaat* bersifat umum, asas *lex specialis derogate legi generale* berlaku.

- e. Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam, yaitu perjanjian lisan/tidak tertulis dan perjanjian tertulis.

Yang termasuk perjanjian lisan adalah :⁷⁶

- 1) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dengan adanya kata sepakat diantara para pihak.⁷⁷
- 2) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya.

Yang termasuk perjanjian tertulis, yaitu :

- 1) Perjanjian *standar* atau baku, yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.⁷⁸
- 2) Perjanjian *formal* adalah perjanjian yang ditetapkan dengan formalitas tertentu.⁷⁹

Perjanjian ini dikenal dengan istilah akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁰

Menurut bentuknya akta dibedakan menjadi dua⁸¹ yaitu :

⁷⁶ *Ibid*, hal 19.

⁷⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 48.

⁷⁸ Djaja, S. Melilala, *Op. Cit*, hal. 90.

⁷⁹ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 16.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 116.

⁸¹ *Ibid*, hal 119-126.

- 1) Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang memuat tentang adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan dan mengikat bagi pembuatnya ataupun bagi pihak ketiga.

Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta otentik dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Akta pejabat (*acte amtelijke*).

Akta yang inisiatif pembuatannya dari pejabat yang bersangkutan (dibuat oleh pejabat).

- b) Akta para pihak (*acte partij*).

Akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang.

Akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, artinya :

- a) Sempurna maksudnya bahwa untuk membuktikan akta itu sempurna/tidak, atau benar/tidak, cukup dibuktikan dengan akta itu sendiri, tidak memerlukan pembuktian dengan alat bukti lainnya.
- b) Mengikat maksudnya bahwa hakim harus menguji kebenaran isi akta otentik itu sendiri kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- 2) Akta di bawah tangan, adalah akta yang pembuatannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak atau tidak ada campur tangan dari pejabat.

- f. Perjanjian menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu :⁸²

- 1) Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama.
- 2) Perjanjian *accessoir*, adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama/pokok.

⁸² Salim HS, *Op. Cit*, hal. 20.

g. Penggolongan perjanjian berdasarkan ada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban tersebut :

- 1) Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.
- 2) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain.

13. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian berakhir karena :⁸³

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata).
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak (hal ini terjadi bila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lain dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak) atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian.
- e. Karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai dengan kata lain dilaksanakannya obyek perjanjian atau prestasi.
- g. Dengan persetujuan para pihak.

C. Kredit Bermasalah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan Kredit dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁸⁴

⁸³ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 64.

⁸⁴ Badriyah Harun, *Op. Cit*, hal 116-117.

Dalam istilah perbankan, kredit macet disebut “*dubius*”. *Dubius* timbul karena *cash flow* debitur yang tidak lancar. Akibatnya debitur tidak dapat membayar angsuran/bunga kreditnya.

Mengenai pengertian kredit macet, ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Menurut Bank Indonesia, kredit dikatakan macet apabila telah diusahakan oleh bank dengan memberikan perpanjangan waktu atau kelonggaran, serta *ajust* dan *reajust*, utangnya tetap tidak dibayar. Jadi sudah ada tindakan intern bank terlebih dahulu, tetapi debitur tidak juga membayar angsuran/bunga.
2. Menurut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kredit dianggap macet apabila debitur tidak membayar utangnya menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.

Jika kita perhatikan, pengertian kredit macet yang diberikan PUPN cukup keras. Bila debitur tidak membayar utang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka langsung divonis kredit macet. Sedangkan menurut Bank Indonesia tidak langsung divonis kredit macet. Tetapi masih diberikan kesempatan memperbaiki usaha debitur, kalau perlu dengan bantuan bank. Dikatakan macet jika secara total debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya.

Di Indonesia bank-bank pada umumnya tidak menganut pengertian PUPN. Jarang sekali dalam praktik perbankan, pengertian kredit macet menurut PUPN itu diterapkan. Tetapi bank-bank pada umumnya lebih cenderung menerima pengertian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Kredit bermasalah atau kredit macet pada mulanya diawali terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji), di mana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan debitur), maupun akibat adanya itikad baik pihak debitur. Wanprestasi bisa juga disebabkan oleh pihak bank

karena membuat syarat Perjanjian Kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Wanprestasi menurut R. Subekti dapat berupa empat kategori:⁸⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi. Dalam praktik hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Pihak Bank pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitur agar kembali memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat teguran tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi janji prestasi, dan apabila batas waktu tersebut terlewati maka debitur sudah dapat dikategorikan wanprestasi. Penetapan debitur sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat menyebabkan akibat hukum lebih lanjut.

Nasabah debitur, jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi Perjanjian Kredit, maka portofolio kreditnya dapat digolongkan Kredit Macet, dan debitur tersebut dapat digugat pihak

⁸⁵ Iswi Hariyani dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal 112.

bank melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Gugatan perdata semacam ini, dalam praktiknya jarang dilakukan sebab prosesnya panjang dan berbelit-belit, sehingga pihak bank umumnya lebih suka memilih cara lain yang lebih mudah, misalnya lewat permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Sanksi bagi debitur yang wanprestasi (ingkar janji) ada 4 (empat) macam :⁸⁶

- Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- Kedua : Pembatalan perjanjian.
- Ketiga : Peralihan risiko.
- Keempat : Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di pengadilan.

Ganti rugi dapat terdiri dari tiga unsur, yaitu : biaya, rugi, dan bunga.

- a) Biaya adalah segala pengeluaran atau biaya yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
- b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai (wanprestasi) untuk melakukan :

- a) Pemenuhan perjanjian;
- b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c) Ganti rugi saja;
- d) Pembatalan perjanjian;
- e) Pembatalan disertai ganti rugi.

⁸⁶ *Ibid*, hal 67-68.

D. Pengawasan Kredit

Secara spesifik pengertian pengawasan kredit selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas dapatlah dirumuskan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit, pengertian penjagaan (*safe guards*) disini tentu lebih bersifat preventif.

Sedangkan pengertian dari pengamanan disini bersifat represif, untuk menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensial akan timbul lebih besar. Atau usaha represif ini kalau mampu untuk mencegah kerugian tersebut sama sekali, minimal harus mampu untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul. Pada tahap pertama disini fungsi pengawasan kredit lebih banyak mendekati fungsi polisionil yaitu dalam bentuk penjagaan dan pengamanan tersebut.

Pengawasan kredit yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif :

1. Pengawasan Aktif, dilakukan dengan *On The Stop*, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul.
2. Pengawasan Pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca rugi atau laba), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari keadaan stock perkembangan usaha) dan sebagainya.

Pengawasan individual debitur dilakukan melalui hasil analisis kreditnya, segala aspek dalam analisis diikuti terus selama kredit

berjalan, terutama sekali tentang produktivitas yang harus dicapainya.⁸⁷

E. Komite Kredit

Komite Kredit adalah *loan committee* yaitu komite operasional yang membantu Dewan Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.⁸⁸

Adapun fungsi komite kredit adalah menentukan batasan pemberian kredit kepada debitur. Berkaitan dengan penelitian penulis tentang studi di BPR Jateng, maka penulis sampaikan tentang ketentuan BMPK bagi BPR sebagai berikut :⁸⁹

1. BMPK kepada Pihak Terkait

BMPK bagi pihak yang terkait dengan pihak bank, baik secara individu maupun keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % dari modal bank.

2. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait

BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal bank.

3. Terhadap pelampauan BMPK, bank diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia, dan selain itu juga dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan.

4. Terhadap pelanggaran BMPK, dapat dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan diancam dengan sanksi pidana.

F. Tugas dan Wewenang Bagian Legal Bank

Tugas legal bank yaitu melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen,

⁸⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Op.Cit.* hal 268

⁸⁸ Sumber dari Internet

⁸⁹ Djoni S.Gazali, *Op.Cit.* hal 297.

melakukan pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah.

Adapun tugas dan wewenang legal bank adalah:

- 1) Sebagai konsultan hukum perusahaan (bank), yaitu memberikan nasihat/opini hukum kepada pemimpin perusahaan.
- 2) Mereview aktifitas *cooperate legal*.
- 3) Mereview dan menangani perjanjian bisnis serta menangani pengelolaan legal hukum.
- 4) Sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dokumen-dokumen tentang pengajuan kredit.⁹⁰

⁹⁰ Sudaryat, *Legal Bank*, (Bandung: Oace Media, 2008), hal 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Bermasalah di BPR Jateng Semarang

1. BPR Jateng Semarang Selayang Pandang

Pada mulanya BPR Jateng merupakan salah satu BPR yang berada di Jawa Tengah. Pendirian BPR Jateng dilandaskan pada Akta Pendirian No. 10 tanggal 13 Januari 1992, yang dibuat dihadapan Nyonya F. Eka Sumarningsih, SH, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia I No. C2-1688.HT.01.01 th.92, tanggal 21 Februari 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 99, tambahan Nomor 6354/1992 tanggal 11 Desember 1992 dan juga Ijin Menteri Keuangan RI No. Kep.108/KM.17/1992 tanggal 30 November 1992.

BPR Jateng pengelolaannya msih dalam lingkup wilayah Jawa Tengah dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| c. PT. Merdeka Jaya Sentosa | 80% |
| d. Drs. Agus Pramono, MM | 20% |

PT BPR Jateng berlokasi di Kabupaten Grobogan sebagai kantor pusat dan telah mempunyai Kantor Cabang di Semarang pada tahun 2005 yang beralamat di Jalan Kartini No. 11 Semarang, pada tahun 2007 BPR Jateng juga membuka Kantor Kas yang berlokasi di Banyumanik Semarang di jalan Jati Raya Blok D No. 29.

BPR Jateng Semarang dikembangkan secara prudent dengan sistem kerja yang profesional agar dapat memberikan value kepada stakeholders secara luas. Kerja keras karyawan dan dukungan manajemen menjadi suatu harmoni yang kompak dan

solid dalam memajukan dan mengembangkan BPR Jateng Semarang secara keseluruhan.

Untuk rencana kedepan, BPR Jateng Semarang akan lebih dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama dengan mitra kerja (jaringan) dari berbagai kalangan, seperti sekolah, kelompok hobi, kelompok usaha, dan lain-lain, sehingga keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

Meskipun sebagai perusahaan yang berorientasi profit, BPR Jateng Semarang tidak melupakan arti pentingnya kepedulian pada masyarakat yang kurang beruntung. Beberapa kegiatan telah dilakukan tidak hanya sumbangan ke Panti Asuhan, Sembako kepada kaum duafa tetapi juga beberapa kegiatan lain yang sifatnya kepedulian kepada masyarakat.

Untuk lebih mengenalkan keberadaan BPR Jateng Semarang kepada masyarakat luas, manajemen melakukan beberapa kegiatan promosi melalui event-event yang mempunyai nilai tambah kepada masyarakat luas, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan betul-betul tepat guna dan mendapatkan dampak langsung bagi perkembangan BPR Jateng Semarang.

a. Struktur Organisasi BPR Jateng Semarang

Salah satu alat agar tujuan organisasi dapat tercapai yaitu dengan membuat struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi memberikan suatu petunjuk bagaimana hubungan serta pembagian tugas-tugas, memudahkan pimpinan dalam mengadakan pengawasan maupun meminta pertanggungjawaban pada bawahannya.

Dalam melakukan aktifitasnya, BPR Jateng Semarang menganut tipe organisasi garis dan staf (*Line-Staff Organization*), secara formil yang berhak memberikan perintah hanyalah pimpinan, sedangkan staf hanyalah sebagai pembantu pimpinan dalam tugas perencanaan, memberikan nasihat dan lain-lain

yang serupa dengan itu.

Pada organisasi yang besar, luas dan beraneka ragam, tidak mungkin lagi seorang pimpinan mengambil keputusan dalam segala hal. Oleh karena itu, pimpinan mendelegasikan beberapa wewenangnya kepada staf sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal demikian staf menandatangani keputusan, perintah, instruksi dan lain-lain atas nama pimpinan.

Adapun struktur organisasi BPR Jateng Semarang adalah :

1) Direktur Utama

- a) Memimpin dan mengelola seluruh kegiatan kantor cabang (kanca) BPR Jateng Semarang di wilayah kerjanya dan bekerjasama dengan seluruh *Officer* serta pegawai lainnya untuk mencapai saluran laba yang lebih diinginkan.
- b) Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis, mobilisasi dana dan jasa perbankan lainnya, memantau hasil dan memecahkan hasilnya serta memecahkan masalah yang timbul di kanca.
- c) Menjamin terlaksananya praktik perbankan yang sehat di kanca dan BPR Jateng Semarang yang dipimpinnya.
- d) Mewakili kanca yang dipimpinnya dalam koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan urusan-urusan di kantor pusat.
- e) Mewakili direksi dalam berurusan dengan pemerintah dan nasabah setempat.
- f) Menetapkan tujuan, anggaran dan rencana kegiatan kanca.
- g) Menjamin tercapainya laba yang diinginkan.
- h) Menjamin kelancaran, efisiensi dan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada nasabah.
- i) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui telah sah dan sesuai kewenangannya.
- j) Menjamin tercapainya portofolio pinjaman yang baik.

- k) Menjamin keakuratan seluruh pembukuan.
 - l) Menjamin bahwa seluruh pegawai telah terlatih dan melakukan pengembangan ketrampilan untuk keberhasilan tugas-tugasnya.
 - m) Mengembangkan kualitas yang cukup dari keahlian manajerial dan fungsional.
 - n) Menjamin pemenuhan seluruh kebijaksanaan dan prosedur perbankan.
 - o) Menjamin pemenuhan hasil-hasil audit yang memuaskan.
 - p) Menjamin pemenuhan seluruh informasi atau laporan yang diperlukan oleh unit kerja BPR Jateng Semarang lainnya dari instansi lainnya sesuai batas wewenang yang dimiliki.
- 2) Pimpinan Bagian Pemasaran (BP)
- a. Menjamin pengembangan rencana dan strategi bisnis, penetapan program dan tujuan untuk mencapai sasaran laba yang diinginkan.
 - b. Memaksimumkan pendapatan dari pasar sasaran (target market)
 - c. Meminimumkan kerugian dan tunggakan dari kredit yang mengandung masalah.
 - d. Membuat rencana kerja dan anggaran.
 - e. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.
 - f. Membina personil unit-unit kerja.
 - g. Mengadakan komunikasi di kantor cabang, kantor wilayah, kantor pusat dan dengan instansi lain dalam batas wewenang.
- 3) *Account Officer* (AO)
- a. Menjamin pencapaian sasaran pada segmen pasar yang telah ditetapkan dan kriteria batasan risiko masing-masing nasabah potensial sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengembangkan lebih lanjut strategi dan rencana kerja

untuk nasabah dan prospek usahanya.

- c. Mengembangkan dan memasarkan produk baru baik kredit maupun non kredit serta rencana pemasarannya sesuai dengan keinginan dan prospek bagi nasabah.
 - d. Melaksanakan negosiasi dan menerapkan peraturan kredit yang standar kepada tiap jenis rekening kredit.
 - e. Melakukan pengembangan kredit.
 - f. Memastikan bahwa seluruh dokumen kredit dikelola dengan baik.
 - g. Melakukan identifikasi dan melaporkan permasalahan nasabah.
 - h. Bekerjasama dengan unit kerja untuk memastikan bahwa nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan.
 - i. Membimbing para AO lainnya dan para train dalam mempelajari pekerjaannya.
 - j. Membuat rencana kerja dan anggaran.
 - k. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.
 - l. Mengadakan komunikasi.
 - m. AO melakukan pemberian pembinaan dan pengawasan KUT sejak persiapan, permohonan, pengajuan realisasi kredit sampai dengan pengembalian kredit.
- 4) Koordinator Administrasi Kredit (Kor. ADK)
- a. Menjamin pemenuhan seluruh kebijakan dan prosedur kredit.
 - b. Menjamin bahwa semua pegawai kanca mempunyai penafsiran yang sama terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang baru.
 - c. Mengadakan pertemuan dengan WBP dan AO untuk membicarakan kredit baru, pembaharuan dan masalah kredit lainnya.
 - d. Mengelola proses permohonan kredit.

- e. Menjamin bahwa analisa keuangan dilakukan dengan lengkap di dalam aplikasi kredit.
 - f. Menjamin pengisian formulir persyaratan dan realisasi kredit telah dilakukan dengan benar.
 - g. Menjamin keakuratan pembuatan laporan dan analisa portofolio kanca.
 - h. Membuat rencana kerja dan anggaran.
 - i. Mengadakan komunikasi.
- 5) Operasional Kredit Umum (OPK Umum)
- a. Menjamin proses permohonan pinjaman di dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan kebijakan.
 - b. Menjamin pemenuhan dari persyaratan yang telah ditentukan lebih dahulu sebelum pembayaran atau realisasi.
 - c. Melayani permintaan informasi kredit bank.
 - d. Menyimpan berkas pinjaman dalam lemari arsip pinjaman.
 - e. Membuat rencana kerja dan anggaran.
 - f. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.
 - g. Mengadakan komunikasi.
- 6) *Operation Officer* (OO)
- a. Menjamin kelancaran, keramahan dan efisiensi dalam pelayanan kepada nasabah.
 - b. Menjamin bahwa transaksi, laporan dan aktifitas lainnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional dan dalam batas-batas wewenang.
 - c. Melakukan prosedur akhir hari.
 - d. Melakukan kas kanca setiap hari.
 - e. Menyetujui pengambilan uang kas dari nasabah sampai dengan batas-batas wewenang yang dimilikinya.
 - f. Menjamin bahwa seluruh transaksi jasa serta transaksi pinjaman telah diproses dan laporan-laporan telah dibuat

atau disiapkan sesuai dengan operasional kanca.

g. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.

h. Mengadakan komunikasi.

7) Seksi Pelayanan Kas

a. Menjamin kelancaran, efisiensi dan keramahan pelayananpelayanan kas kepada nasabah.

b. Menjamin bahwa seluruh transaksi keuangan telah diproses, laporan telah disiapkan dan tugas-tugas lain telah dikerjakan sesuai dengan prosedur dalam manual operasional.

c. Menjamin keamanan kas kanca.

d. Membuat rencana kerja dan anggaran.

e. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.

f. Mengadakan komunikasi.

8) Seksi Pelayanan Jasa

a. Menjamin kelancaran dan keramahtamahan pelayanan simpanan terhadap nasabah.

b. Menjamin kelancaran dan keramahtamahan jasa bank lainnya dan memproses pelayanan terhadap nasabah.

c. Menjamin bahwa seluruh transaksi simpanan dan jasa bank lainnya telah diproses, menyiapkan laporan dan tugas lainnya yang tidak menyimpang dari prosedur operasi.

d. Menjamin tetap terbinanya hubungan yang baik dan memuaskan bagi nasabah.

e. Menjamin pemahaman dan kelancaran arus informasi yang tepat guna bagi nasabah, khususnya mengenai semua jenis produk BPR Jateng Semarang.

f. Menjamin kebenaran dan keamanan kode pengiriman uang.

g. Membuat rencana kerja dan anggaran.

h. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.

i. Mengadakan komunikasi.

9) Seksi Pelayanan Pinjaman

- a. Menjamin kelancaran, keefisienan dan keramahan pelayanan pinjaman umum kepada nasabah.
- b. Menjamin bahwa semua transaksi kredit umum baik realisasi maupun anggaran telah diproses, disiapkan laporan dan tugastugas lain dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- c. Menjamin keamanan dari seluruh dokumen dan berkas pinjaman asli.
- d. Membuat rencana kerja dan anggaran.
- e. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.
- f. Mengadakan komunikasi.

10) Koordinator Keuangan dan Laporan (KorKuLap)

- a. Menjamin seluruh transaksi keuangan sudah terbuku dan menjamin keseimbangannya setiap hari.
- b. Menjamin bahwa seluruh verifikasi dan rekonsiliasi sudah dilakukan dengan benar dan tepat waktunya.
- c. Menjamin bahwa perhitungan bunga sudah dikerjakan secara cermat dan tepat.
- d. Menjamin seluruh laporan dan rekening koran sudah dilakukan dengan benar penyajiannya dan dikirim tepat pada waktunya.
- e. Menjamin persiapan pembuatan anggaran untuk kanca dan BPR Jateng Semarang unit.
- f. Menjamin semua peralatan pembukuan berjalan dengan benar, efisien dan dipelihara, dikerjakan sesuai petunjuk penggunaannya.
- g. Memberikan perhatian atas hasil-hasil audit.
- h. Mengadakan komunikasi.

2. Faktor-faktor Kredit Bermasalah di BPR Jateng Semarang

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rudy Irianto sebagai Direktur BPR Jateng pada tanggal 17 Pebruari 2011, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng adalah sebagai berikut :

1. Debitur tidak sanggup bayar.

Perlu diketahui kenapa debitur tidak sanggup membayar hutangnya. *Legal Officer* harus mencari sebab-sebabnya dengan mengadakan *check on the spot*, terjun langsung ke perusahaan debitur.

Dalam melakukan *check on the spot*, *Legal Officer* mencari fakta-fakta mengenai perusahaan debitur. Fakta itu dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Dari semua data yang diperoleh, maka akan diketahui penyebab debitur tidak sanggup membayar hutangnya. Biasanya fakta-fakta penyebab itu adalah :

a. Usaha debitur gagal.

Kegagalan ini dapat disebabkan beberapa faktor. Misalnya : pemasaran produk perusahaan mengalami kelesuan yaitu tidak laku. Pendapatan debitur menciut, akibatnya perusahaan mengalami kesulitan membayarkan hutangnya. Profit yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan terjadi kerugian.

b. Penyelewengan oleh pengurus.

Keberhasilan perusahaan juga tergantung dari kejujuran pengurus. Kalau pengurus perusahaan debitur jujur, maka uang perusahaan akan aman, tetapi kalau pengurus mengkorupsi uang perusahaannya, maka perusahaan akan bangkrut tetapi pengurusnya kaya. Ada pemimpin perusahaan yang menggunakan uang pinjaman dari bank untuk kawin lagi atau membeli rumah untuk diri sendiri.

Menerima komisi dari supplair perusahaan dengan menggunakan perusahaannya. Akibatnya perusahaan debitur tidak mampu membayar hutangnya.

c. Debitur tidak mau bayar.

Banyak debitur yang tidak mau membayar angsuran/bunga hutangnya. Mereka termasuk debitur nakal. Mau ambil kredit tetapi tidak mau bayar. Mereka menganggap kredit bank adalah suatu hadiah, sehingga tidak perlu dibayar. Jaminan yang diberikanpun dari tanah yang dibayar.

2. Gangguan perorangan.

Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar berasal dari debitur perorangan, yang berasal dari penghasilan tetap mereka, misalnya : gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka, sehingga menyebabkan ketidak lancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. Selain itu, penyebab kredit macet perorangan yang erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya : kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian.

3. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan dan kebakaran seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur. Akibatnya, jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun. Akibat selanjutnya adalah likuiditas keuangan debitur memburuk.

4. Debitur kekurangan dana.

Data kebutuhan dana yang disampaikan kepada bank ada yang kurang, sehingga analisis bank/*estimate* bank atas kebutuhan dana menjadi *under*. Hal ini yang bisa menyebabkan

proyek yang ditangani oleh debitur tidak selesai. Akibatnya, debitur mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya.

5. Kesulitan menagih piutang.
6. Itikad buruk/debitur nakal.

Dalam hal ini, ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- a. Debitur sebenarnya merasa mampu untuk membayar hutangnya, tetapi dia beritikad tidak mau membayar hutangnya.
- b. Debitur sebenarnya merasa mampu untuk membayar hutangnya, tetapi dia lalai atau memang sengaja lalai untuk membayar hutangnya.

7. Penyalahgunaan kredit.

Terkadang kredit yang diajukan oleh debitur tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya : debitur mengajukan kredit kepada kreditur (bank) untuk tambahan modalnya yaitu toko atau warung, tetapi dalam praktiknya uang pinjaman tersebut digunakan untuk konsumtif atau memperbaiki rumahnya.

Selain faktor-faktor kredit macet di atas yang berasal dari debitur, ada juga faktor-faktor kredit macet yang berasal dari pihak bank itu sendiri yaitu :

1. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.

Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara professional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpuhnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan halus atau tidak halus dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dan calon debitur, atau karena strategi pemberian

kredit yang selalu ekspansif. Sebab yang disebut terakhir timbul karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah.

2. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Oleh karena lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Sebagai kelanjutannya, mereka tidak dapat segera melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis dan keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

B. Peranan Komite Kredit di dalam Perbankan untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah di BPR Jateng Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara penulis dengan Bapak Rudy Irianto sebagai Direktur BPR Jateng pada tanggal 17 Pebruari 2011, maka di PT BPR Jateng tugas kepala staf legal yang juga merangkap administrasi kredit sebagai berikut dan sebagai komite kredit ke 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan, kebenaran, serta keabsahan berkas keputusan kredit dan dokumen persyaratan kredit yang diterima.
2. Membuat dan mempersiapkan surat atau dokumen yang diperlukan dalam pemberian kredit antara lain Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, pengikatan agunan, tanda terima dokumen kredit atau bukti kepemilikan agunan dan order kepada Notaris.

3. Membuat surat atau instruksi untuk pemblokiran agunan dan pengecekan keaslian dokumen agunan.
4. Mengelola dokumen asuransi, proses penutupan asuransi dan memantau perpanjangan asuransi yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mempersiapkan dokumen untuk keperluan *disbursement* serta membuat instruksi *disbursement* kredit ke fungsi operasi kredit. Memberikan informasi mengenai dokumen yang jatuh tempo dan dokumen yang harus dilengkapi oleh debitur kepada *Account Officer*.
6. Mengelola dan menyimpan dokumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Rudy Irianto sebagai Direktur BPR Jateng pada tanggal 17 Pebruari 2011, tugas komite kredit dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap debitur meliputi beberapa kriteria di bawah ini, yaitu : Harus memenuhi kriteria 5 C, diantaranya :

a. *Character* (penilaian terhadap kepribadian)

Character adalah keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur atau nasabah mempunyai watak moral atau sifat pribadi yang positif dan punya rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tujuan Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Penilaian ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam hasil penelitian, diperoleh keterangan untuk memastikan bahwa bank dapat menyakini itikad baik nasabah dalam bisnis dan pembayaran kewajiban kepada bank, watak peminjam harus dianalisa.

Ketentuan penilaian terhadap *Character* ini berlaku untuk calon debitur perorangan maupun untuk Badan Usaha. *Character* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor biologis/ keturunan (yang akan menentukan watak dasar dari calon debitur) dan faktor pelajaran dan pengalaman hidup. Untuk dapat menganalisa watak peminjam/ nasabah bank memerlukan berbagai informasi yang relevan, antara lain:

1) Riwayat hubungan dengan bank

Harus dilihat apakah yang bersangkutan nasabah lama ataukah baru. Jika nasabah lama, harus melihat sejauhmana kualitas hubungan selama menjadi nasabah. Yang penting bagaimana kualitas hubungan selama jangka waktu tertentu khususnya kepatuhan dalam pemenuhan persyaratan kredit.

2) Riwayat Hidup

Menyangkut latar belakang dari calon debitur apakah calon debitur mempunyai latar belakang yang baik dalam keluarga seperti pekerjaan ayah, ibu dan kakak atau adik, dan bagaimana lingkungan tempat tinggal dari calon debitur dan instansi atau tempat kerja dari calon debitur.

3) Riwayat bisnis peminjam

Analisa riwayat bisnis peminjam menyangkut latarbelakang bisnis dan pengalaman bisnis nasabah yang akan memberikan gambaran kepada bank tentang kemungkinan keberhasilan pencapaian rencana dimasa mendatang dapat dilihat dari seberapa jauh perusahaan memiliki perhatian pada pengembangan produk dan semangat untuk selalu mengikuti perkembangan sektor bisnis yang diterjuninya. Kemauan untuk menambah pengetahuan menunjukkan keserasian untuk mampu bersaing.

4) Reputasi bisnis nasabah

Ini menyangkut pandangan pihak lain yang berkaitan dengan perilaku bisnisnya. Akan memberikan masukan berharga bagi bank,

seperti halnya : apakah perusahaan peminjam termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, apakah ada masalah dengan pemerintah atau hukum.

Perusahaan yang pernah melanggar hukum menyebabkan pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap perusahaan sehingga mempengaruhi citra perusahaan, yang penting lagi tindakan yang salah yang pernah dilakukan perusahaan kemungkinan akan terjadi lagi pada bank sehingga akan merugikan bank.

5) Legalitas usaha

Aspek legal kegiatan usaha perlu diteliti agar bank tidak membiayai usaha yang ilegal atau memberikan pinjaman pada usaha-usaha yang bank dilarang untuk membiayainya.

Seperti kredit yang diberikan kepada perusahaan yang status perijinannya tidak memadai akan memiliki risiko yang sangat tinggi bagi bank karena kemungkinan usaha tersebut, maka kemungkinan besar pengembalian kreditnya tidak berjalan lancar. Hal ini dapat merugikan bank.

b. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian ini menyangkut keahlian (calon) nasabah peminjam dana dalam mengelola usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin kredit yang diberikannya tidak akan mengalami kemacetan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauhmana hasil usaha/pendapatannya yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasi hutangnya tepat waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, diperoleh keterangan bahwa Ketentuan penilaian terhadap *Capacity* ini berlaku untuk calon debitur perorangan maupun untuk Badan Usaha. Penilaian terhadap kemampuan calon debitur perorangan dilihat dari segi pendapatan dan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, yang meliputi :

1. Pendapatan kotor dari pekerjaan pokok dan dari pekerjaan lain.
2. Pendapatan kotor dari isterinya : dari pekerjaan pokok dan dari pekerjaan lain.
3. Potongan-potongan tetap dari gaji. Atas beban isterinya maupun suaminya.
4. Biaya-biaya tetap yang lain, seperti : sewa rumah, listrik, air dan pajak-pajak lain.

Sementara bagi calon debitur Badan Usaha berdasarkan keterangan dari kepala bagian kredit BPR Jateng, penilaian kemampuannya meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Produk dapat diterima konsumen (trend/ mode, produk primadona).
2. Harga kompetitif dan menarik, distribusi efektif, promosi tepat.
3. Dapat menyesuaikan dengan kehidupan ekonomi, perubahan kompetisi pasar dan regulasi pemerintah.

c. *Capital* (modal)

Dilihat dari modal yang dimiliki oleh pemohon kredit, penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan secara efektif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, diperoleh keterangan bahwa:

Penilaian terhadap modal dilihat dari adanya kemampuan diri sendiri dari calon debitur (perorangan maupun badan usaha) dan kemampuan untuk menghasilkan produk yang dinilai dari hasil survey dari pejabat perkreditan.

Bagi debitur perorangan penilaian terhadap modal yang dimiliki dilihat dari bagaimana pengalaman kerja dari calon debitur dan minimal calon debitur mempunyai pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun.

Sedangkan bagi debitur badan usaha dilihat dari beberapa hal,

diantaranya:

- 1) Modal/ fasilitas produksi yang dimiliki untuk menghasilkan produk.
- 2) Profesionalisme, semangat kerja, ketrampilan staff.
- 3) Lokasi usaha, kapasitas, tenaga kerja.

d. *Collateral* (agunan)

Collateral adalah barang-barang agunan yang diserahkan debitur sebagai agunan atas kredit yang diterimanya.

Tujuannya yaitu sebagai pengaman bagi bank terhadap kredit apabila usaha nasabah yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak melunasi kreditnya dari usahanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, diperoleh informasi bahwa *Collateral* menjadi faktor penentu dalam pemberian kredit, jika nilai agunan lebih besar dari kredit yang akan diberikan dan mampu untuk mengcover kredit yang akan diberikan (Pokok + Bunga) maka besar kemungkinan kredit akan diberikan karena *collateral* menjadi pengaman atas kredit yang diberikan. Ketentuan mengenai agunan berlaku untuk calon debitur Perorangan maupun Badan Usaha.

Collateral yang akan diberikan oleh calon debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : *Marketability* (adanya pasar yang cukup luas), *Ascertainability of Value* (adanya standar harga tertentu), *Stability of Value* (harga yang stabil/ tidak menurun) dan *Transferability* (dapat dipindah tangankan).

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition adalah situasi dan kondisi (seperti kondisi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan lain-lain) yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Tujuannya untuk mengetahui sejauhmana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak

positif maupun negatif terhadap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh keterangan bahwa kondisi ekonomi disini adalah bagaimana kemampuan dari calon debitur (Badan usaha) dalam memilih sektor ekonomi hal ini dilihat dari jenis usaha yang dijalankan sedangkan bagi debitur perorangan dinilai dari pekerjaannya apakah seorang pegawai negeri atau pegawai swasta jika seorang pegawai negeri akan dikaitkan dengan regulasi dari pemerintah apakah mempunyai prospek yang baik atau malah sebaliknya, sedangkan jika pegawai swasta akan dikaitkan dengan bidang usaha dari perusahaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bapak Rudy Irianto sebagai direktur BPR Jateng, beliau menambahkan:

Penilaian untuk "C" yang lain yaitu adanya *Cash Flow* atau yang disebut dengan "Arus Kas", disini menentukan apakah nasabah debitur mempunyai kemampuan untuk membayar kreditnya atau tidak. Dengan adanya *Cash Flow* ada catatan tersendiri untuk melihat bagaimana kemampuan nasabah debitur dalam melakukan pembayaran kreditnya, apakah dinilai mampu atau tidak.

Selain penilaian di atas, BPR Jateng juga melakukan penilaian dengan menggunakan metode 5 P, berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari kepala bagian kredit BPR Jateng, bahwa secara administratif BPR Jateng menggunakan penilaian dengan menggunakan metode 5 P bukan dengan metode 7 P namun ketentuan dalam metode 7 P seperti *Personality* dan *Prospect* mencakup penilaian 5 C, metode penilaian 5 P antara lain :

1. *Party* (para pihak)

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

Tujuannya untuk memperoleh suatu kepercayaan maka bank harus mengetahui bagaimana karakternya, modalnya, serta loyalitas dari calon nasabah peminjam dana.

Hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, diperoleh keterangan bahwa calon nasabah debitur pada BPR Jateng digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Golongan Pengusaha.

Yaitu semua jenis pengusaha yang bergerak diberbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BPR Jateng, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan kredit.

b. Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap (Golbertap).

1. Pegawai Negeri,

1. Pegawai Negeri Sipil.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian.
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
4. Pegawai Perusahaan Daerah.
5. Pensiunan dari pekerja / pegawai golongan masyarakat berpenghasilan tetap sebagaimana disebutkan pada butir 2.a.

6. Pegawai Tetap dari Perusahaan Swasta.

2. *Purpose* (tujuan)

Tujuan disini sangat penting untuk diketahui oleh bank, apakah kredit yang diberikan nanti digunakan untuk tujuan yang positif dan benar-benar digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, diperoleh keterangan bahwa dalam memberikan kredit mempunyai kriteria jenis kredit yang berbeda disesuaikan dengan tujuannya atau sasarannya yaitu antara lain :

a. Kredit Konsumtif

Yaitu jenis kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bersifat non produktif, misalnya : untuk pendidikan.

b. Kredit Komersial

Yaitu jenis kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kredit ini apabila ditinjau dari segi penggunaannya terdiri dari : kredit modal kerja dan kredit investasi.

3. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Tujuannya adalah untuk mengetahui sumber pendapatan dari calon debitur dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng diperoleh keterangan bahwa untuk *Payment* dinilai dengan menggunakan pendekatan *Repayment Capacity* (RPC) yang diproyeksikan sebesar 75 % terhadap total kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

Perhitungannya didasarkan pada kemampuan membayar debitur (Perorangan dan Badan Usaha) sebesar 75%. Contoh kasus yaitu laba bersih debitur sebelum pemberian kredit sebesar Rp. 100,- setelah diberikan kredit, pendapatannya naik menjadi sebesar Rp. 150,- maka *Repayment Capacity*nya adalah sebesar $75\% \times 150$ jadi kemampuan membayar debitur adalah sebesar 112,5. kemudian setelah hasilnya ketemu maka bank akan tahu berapa jangka waktu dan jumlah angsuran debitur akan mampu mengembalikan hutangnya ke bank.

4. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode laba perusahaan meningkat atau menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara

penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, diperoleh keterangan bahwa perolehan laba erat kaitannya dengan *Payment* namun bukan merupakan angka yang absolut tetapi tergantung pada usaha debitur.

Bagi debitur perorangan ukuran penilaian pada perolehan laba dilihat dari pendapatan tambahan diluar pendapatan pokoknya (gaji) dijumlahkan dengan pendapatan bersih setiap bulannya apakah nilainya lebih besar dengan bunga pinjaman dan apakah pendapatannya mampu untuk membayar kembali kreditnya.

Sedangkan bagi debitur badan usaha besarnya laba dinilai layak atau tidak tergantung dari jenis usaha debitur dan usaha calon debitur telah berjalan selama minimal 2 (dua) tahun dan pada 1 (satu) tahun pertama telah mendapatkan keuntungan.

5. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, dijelaskan bahwa benda-benda yang dijaminakan wajib diasuransikan dan beban biayanya ditanggung oleh debitur, apabila kredit non produktif disarankan diasuransikan atas bangunan, mesin dan persediaan barang. Pengikatan agunan yang digunakan BPR Jateng untuk benda tidak bergerak adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Obyek yang dapat dibebani hak tanggungan pada dasarnya pada hak atas tanah (Hak Milik, HGU, HGB). Sedangkan untuk benda bergerak pengikatannya

menggunakan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi obyek jaminannya yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selain prinsip-prinsip diatas BPR Jateng juga memberikan batasan-batasan dalam pemberian kreditnya. Data yang diperoleh penulis saat wawancara dengan kepala bagian kredit BPR Jateng, menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kredit macet BPR Jateng juga menerapkan Peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Pengertian BMPK yaitu suatu prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. BMPK dilakukan untuk mencegah agar kredit yang diberikan tidak melewati batas maksimum pemberian kredit, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah kredit. Setiap kredit mempunyai *limit*/batasan kredit ditetapkan pada perorangan dan group. Apabila melewati batas maksimum kredit maka dimintakan putusannya pada instansi atasannya dalam hal ini Kantor Pusat .

BPR Jateng mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, BMPK dikelompokkan sebagai berikut :

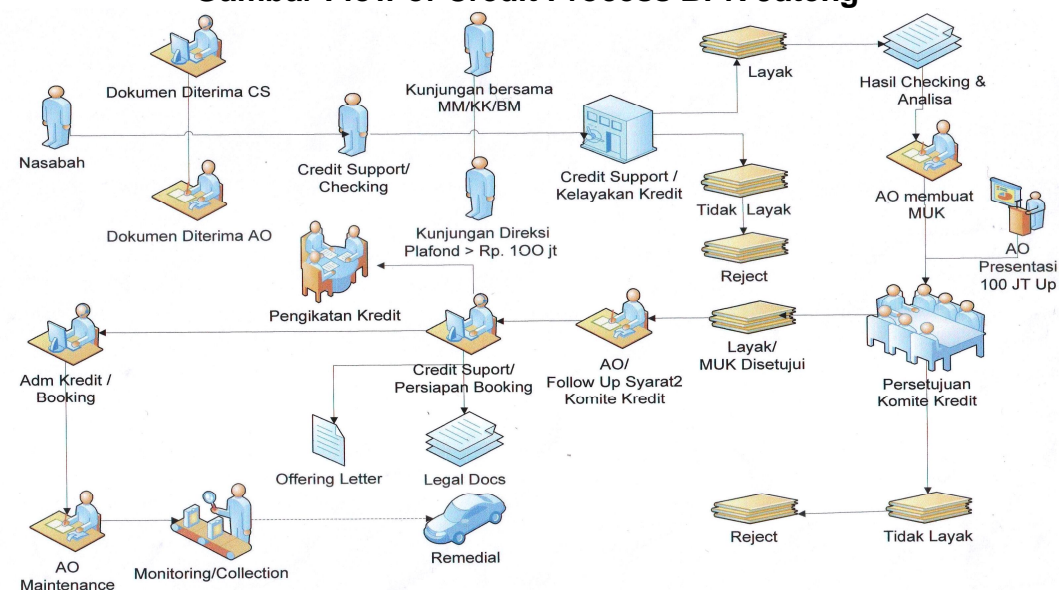
- a. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, sementara kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25 % dari modal bank.
- b. Penyediaan dana untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % dari modal bank.

Selain pembatasan diatas, BPR Jateng juga memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat meliputi :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham, atau.
4. Memberikan kredit untuk tujuan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pejabat Perkreditan BPR Jateng diperoleh keterangan bahwa calon debitur dalam mengajukan kredit kepada kreditur sebelum perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak harus melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar Flow of Credit Process BPR Jateng⁹¹



⁹¹ BPR Jateng Semarang

Penjelasan :

- 1) Calon debitur melakukan pendaftaran dengan mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK) yang diberikan oleh BPR Jateng, kemudian diajukan kepada pihak BPR Jateng, melalui *Customer Service* (CS).
- 2) Setelah SPK diterima, AO memeriksa kelengkapan berkas calon debitur seperti : Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya), Surat izin usaha (SIUP, NPWP, TDP), Tanda bukti pemilikan agunan, dan lain-lain. Tetapi jika data tersebut belum lengkap maka calon debitur wajib melengkapinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPK dibuat dan jika dalam waktu tersebut calon debitur belum melengkapinya maka SPK tersebut dianggap tidak berlaku lagi.
- 3) Kemudian menjelaskan kepada calon debitur menyangkut ketentuan kredit seperti : keperluan dan tujuan penggunaan kredit, besarnya kredit yang diminta, besarnya suku bunga kredit, agunan, dan lain-lain.
- 4) Setelah semua berkas pendaftaran dilengkapi oleh calon debitur kemudian AO memberikan berkas tersebut kepada *Credit Support/Checking*. Jika semua persoalan administrasi telah dilengkapi oleh calon debitur, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon debitur apakah calon debitur telah sesuai dengan Pasar Sasaran (Perorangan atau Badan Hukum) dan Kriteria Risiko yang dapat Dilayani (KRD) seperti :
 - a. Usaha calon debitur telah berjalan selama kurang lebih 2 (Dua) tahun dan pada 1 (satu) tahun pertama telah menghasilkan keuntungan.
 - b. Kelengkapan izin usaha dari calon debitur, seperti : SIUP, NPWP, TDP, dan lain-lain.
 - c. Memenuhi ratio-ratio keuangan, seperti : Solvabilitas, Profitabilitas, Liquiditas.
 - d. Calon debitur tidak tercatat sebagai nasabah yang masuk dalam

kategori Daftar Hitam Bank Indonesia.

- 5) Memberikan disposisi terhadap hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan oleh MM (Marketing Manager) /KK (Kredit Komite) /BM (Branch Manager) yang akan melakukan kunjungan bersama.
- 6) Jika plafond >Rp.100 juta, akan dilakukan kunjungan oleh Direksi.
- 7) Setelah berkas SPK diperiksa maka dilakukan analisa kelayakan kredit oleh bagian *Credit Support* seperti : formulir pemeriksaan agunan (barang bergerak maupun tidak bergerak).
- 8) Setelah seluruh berkas pemeriksaan diterima oleh AO maka AO melakukan Analisis Kredit yang mencakup kriteria *the 5 C's of Credit* (*Character*/ watak, *Capital*/ modal, *Capacity*/ kemampuan, *Collateral*/ agunan, *Condition of Economy*/ kondisi ekonomi) dan *Cash Flow*/ arus kas, selain itu mencakup pula prinsip 5 P (*Party*/ para pihak, *Purpose*/ tujuan, *Payment*/ pembayaran, *Profitability*/ perolehan laba, *Protection*/ perlindungan) dan melakukan pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha yang bersangkutan (*on the spot*).
- 9) Setelah hasil pemeriksaan dilakukan kemudian AO membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan rekomendasi dan akan memberikan MUK (Memo Usulan Kredit) apakah debitur layak atau tidak untuk diberikan kredit, jika debitur dianggap layak untuk diberikan kredit maka debitur akan diberi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi tentang persyaratan kredit yang meliputi Jumlah Kredit, Jangka Waktu Kredit dan lain-lain.
- 10) Jika debitur setuju dengan SPPK tersebut maka akan dilakukan pengikatan kredit berupa penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan yang disepakati.

C. Cara Menangani Penyelesaian Kredit Bermasalah di BPR Jateng Semarang

Setiap pemberian kredit tidak selamanya akan berjalan lancar karena pemberian kredit mempunyai risiko yang sangat besar seperti terjadinya kredit macet. Sama halnya yang terjadi di BPR Jateng, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara antara penulis dengan kepala bagian kredit BPR Jateng diperoleh keterangan bahwa terjadinya kredit macet kemungkinan besar bisa terjadi karena pemberian kredit ini mengandung risiko yang sangat besar. Data mengenai debitur yang wanprestasi untuk 3 tahun terakhir dari tahun 2008 s/d 2010 menunjukkan angka yang selalu meningkat, bahkan peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2010. Dari hasil wawancara dengan pihak BPR Jateng dijelaskan bahwa peningkatan yang terjadi lebih dikarenakan adanya penurunan daya beli dari masyarakat terhadap produk domestik sehingga mengakibatkan produksi menurun dan banyak debitur yang tidak mampu untuk membayar angsuran pada bank bahkan banyak usaha dari debitur yang gulung tikar (bangkrut) karena tidak mampu menanggung beban biaya yang terus meningkat.

Terhadap debitur yang wanprestasi BPR Jateng akan memberikan sanksi. Sanksi yang ditentukan oleh bank diklasifikasikan ke dalam kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri, menurut hasil wawancara, ada beberapa penggolongan tingkat kesehatan dalam pembayaran, sebagai berikut :

- a. Lancar (L) adalah pinjaman dengan tingkat pembayaran tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan, dihitung dari keterlambatan hari 1 sampai dengan 90 hari, disebut Call 1.
- b. Kurang Lancar (KL) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, disebut Call 2.
- c. Diragukan (D) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari sampai dengan

270 hari, disebut Call 3.

- d. Macet (M) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 271 hari, disebut Call 4.

Untuk mengatasi adanya debitur yang wanprestasi di BPR Jateng, diadakan Pantauan Pengelolaan Tunggakan, sebagai berikut :

1) Call 1-Call 2

- a) Pantauan dilakukan oleh AO
- b) Supervisi Langsung oleh Kepala Kantor dan Direktur II
- c) AO bertugas mengamankan pembayaran angsuran tepat waktu, tidak boleh ada tunggakan dan mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi.

2) Call 3

- a) Pantauan dilakukan oleh *Collection*
- b) Supervisi Langsung oleh Direktur Utama
- c) *Collection* bertugas mencari jalan keluar penyelesaian tunggakan, koordinasi dengan AO, dan menghubungi semua debitur tertunggak untuk ditemui management guna mencari solusi permasalahan.
 - 1. Plafond 2 juta -10 juta : Kepala Kantor Kas
 - 2. Plafond > 10 juta - 50 juta : Kepala Cabang atau Direksi II
 - 3. Plafond > 50 juta - 150 juta : Direktur II
 - 4. Plafond > 150 juta : Direktur Utama

3) Call 4

- a) Pantauan oleh Remedial
- b) Supervisi Langsung oleh Direktur Utama
- c) Remedial bertugas mencari jalan keluar penyelesaian NPL (*Non Performing Loan*) atau jumlah nominal kredit dan berkoordinasi dengan *Collection*.

Ada beberapa cara yang ditempuh oleh BPR Jateng dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu :

a. Penyelesaian Secara Damai.

- 1) Pemberian keringanan tingkat suku bunga.

2) Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda.

3) Penjualan agunan.

4) Pemberian keringanan tunggakan pokok pinjaman.

b. Penyelesaian Secara Hukum.

Penyelesaian melalui saluran hukum karena upaya-upaya damai yang dilakukan sudah tidak ditemukan jalan keluarnya lagi. Penyelesaian secara hukum melalui :

a) Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

b) Melalui badan peradilan.

c. Penyelesaian kredit dengan upaya Penagihan.

Upaya aktif yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur atau melalui *debt collector*.

d. Melalui Penjualan atau pengalihan kredit.

Adalah melalui penjualan atas hak tagih beserta seluruh barang jaminan kepada pihak ketiga.

e. Melalui eksekusi jaminan, melalui lelang atau menjual jaminan kepada pihak ketiga dan untuk pelaksanaan eksekusi apabila diperlukan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terhadap arti penting posisi legal dalam komite kredit guna mencegah timbul kredit bermasalah di BPR Jateng, antara lain :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng yaitu bisa dari pihak debitur, pihak bank sendiri serta bisa berupa bencana alam.

Selain faktor tersebut di atas, ada beberapa hal yang merupakan hambatan bagi legal dalam melakukan tugasnya, yaitu :

- a. Data calon debitur kurang valid atau diragukan kebenarannya.
 - b. Barang yang dijadikan jaminan oleh calon debitur tidak layak atau dalam sengketa.
 - c. Sikap tertutup calon debitur dalam memberikan keterangan tentang identitas, penghasilan, jaminan dan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan petugas pelaksana legal audit.
2. Peranan komite kredit di dalam perbankan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di BPR Jateng yaitu memeriksa kelengkapan, kebenaran, serta keabsahan berkas keputusan kredit dan dokumen persyaratan kredit yang diterima. Untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah, komite kredit dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur meliputi beberapa kriteria seperti penilaian dengan menggunakan prinsip *the 5 C's of Credit* + 1 C, diantaranya *Character*/ watak, *Capacity*/ kemampuan, *Capital*/ modal, *Collateral*/ agunan, *Condition Of Economy*/ kondisi ekonomi, dan *Cash Flow*/ arus kas. Selain itu komite kredit juga menggunakan metode penilaian dengan menggunakan prinsip 5 P, diantaranya : *Party*, *Purpose*,

Payment, Profitability, Protection. Dalam pengelolaan kredit, komite kredit juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta memperlakukan batasan-batasan dalam pemberian kredit.

3. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah BPR Jateng melakukan beberapa cara, yaitu: secara damai, penagihan, menjual jaminan dan secara hukum/pengadilan.

B. Saran

1. Dalam pemberian kredit di BPR Jateng harus dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan segala faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.
2. Sebelum memberikan kredit komite kredit harus meneliti dan menganalisis dengan seksama calon debitur serta menganut asas-asas perkreditan yang sehat, sehingga bisa mencegah timbulnya kredit bermasalah.
3. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, BPR Jateng hendaknya menyelesaikannya dengan cara bernegosiasi terlebih dahulu antara pihak kreditur dan debitur, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan melalui jalur hukum/pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, , 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, PT. Agung, Jakarta.
- Badruzaman, Marium Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2006, *KUH Perdata Buu III*, Alumni, Bandung.
- Budi Untung, H., 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Dendawijaya, 2003, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoni S.Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumhana, Mohamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi dan Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Edisi Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Iswardono, 1990, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komarudin, 1979, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Meliala, Djaja S., 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

-, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Anwar, 2003, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, BPHN Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, tanggal 14-18 Juli.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, 2006, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rahardjo, Juni, 1995, *Hukum Administrsi Indonesia Pegetahuan Dasar*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Rahman, Hasanudin, 1995, *Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, HS., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singa Rimbun, Masri, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Lp3ES, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1984, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta.
-, 1983, *Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soedewi, Sri, 1995, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Solly Lubis, M., 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Majuh, Bandung.
- Subekti, R., 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

-, 1981, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudaryat, 2008, *Legal Bank*, Oace Media, Bandung.
- Sutojo, Siswanto, 2007, *The Management of Commercial Bank*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Sutopo, H.B., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 2005, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
-, 1991, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Jakarta.
- Syahdeni, Sutan Remy, 1996, *Beberapa Permasalahan Undang- Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tje 'Aman, Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Yooke, dkk, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.